

BUKU AJAR GENERAL BUSINESS ENVIRONMENT



Disusun Oleh:
Dr. Ita Fionita, S.E., M.M.
Dr. Novita Sari, S.Sos, M.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul *General Business Environment* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis global, meliputi aspek ekonomi, sosial, teknologi, hukum, politik, serta lingkungan hidup. Selain itu, buku ini juga mengkaji bagaimana dinamika perubahan faktor-faktor tersebut berdampak pada strategi bisnis dan bagaimana keterampilan analitis dapat dikembangkan guna mendukung pengambilan keputusan strategis yang beretika.

Sebagaimana ditegaskan oleh **Peter F. Drucker**, tokoh yang dianggap sebagai *father of modern management*, bahwa "*Bisnis tidak dapat dipandang sebagai entitas yang terisolasi; ia selalu beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis.*" Pandangan ini memberikan landasan konseptual yang kuat bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal perusahaan, tetapi juga oleh sensitivitas terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini disusun untuk memberikan wawasan akademis sekaligus praktis kepada mahasiswa, peneliti, maupun praktisi bisnis agar mampu memahami dan menganalisis lingkungan bisnis secara komprehensif. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus panduan dalam merumuskan strategi yang berkelanjutan serta berlandaskan etika.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis di era globalisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Pertemuan 1 General Business Environment.....	5
A. Pengertian General Business Environment.....	5
B. Dimensi-Dimensi General Business Environment	5
C. Dampak Lingkungan Bisnis terhadap Perkembangan Perusahaan 7	
D. Urgensi Keterampilan Analitis dalam Menyikapi Lingkungan Bisnis	9
E. Tugas	10
Pertemuan 2 Ekonomika Pembangunan dan Pembangunan Regional...	11
A. Pembangunan Ekonomi	11
B. Pembangunan Regional.....	13
C. Kebijakan Pembangunan	15
D. Instrumen Kebijakan Pembangunan.....	16
E. Globalisasi dan Dampaknya	17
F. Tantangan dan Peluang.....	17
G. Tugas	18
Pertemuan 3 Kebijakan Moneter dan Fiskal	19
A. Konsep Push and Pull	19
B. Ekonomi Moneter.....	19
C. Kebijakan Moneter.....	20
D. Kebijakan Fiskal.....	21
E. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal	23
F. Tantangan dalam Menyelaraskan Kebijakan Moneter dan Fiskal 24	
G. Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Lingkungan Bisnis	24
H. Studi Kasus: Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19	25
I. Tugas	26
Pertemuan 4 Kebijakan Industri dan Sektoral.....	27

A.	Konsep Kebijakan Industri dan Sektoral.....	27
B.	Indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam Konteks Industri.....	28
C.	Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi.....	28
D.	Peningkatan Daya Saing Global.....	29
E.	Studi Kasus: Kebijakan Industri dan Sektoral di Indonesia.....	30
F.	Tugas.....	31
Pertemuan 5	Lingkungan Demografi	32
A.	Konsep Lingkungan Demografi.....	32
B.	Kebijakan Demografi yang Efektif	32
C.	Rekomendasi untuk Menangani Tantangan Demografi.....	33
D.	Dampak Lingkungan Demografi terhadap Lingkungan Bisnis ...	33
E.	Studi Kasus: Bonus Demografi.....	34
F.	Tugas.....	34
Pertemuan 6	Lingkungan Sosial dan Budaya	35
A.	Konsep Lingkungan Sosial dan Budaya.....	35
B.	Dinamika Sosial dan Perubahan Nilai	35
C.	Peran Lingkungan Sosial dan Budaya dalam Lingkungan Bisnis	35
D.	Dampak Globalisasi terhadap Identitas Lokal	36
E.	Teknologi dan Komunikasi: Perubahan dalam Komunikasi dan Interaksi Sosial.....	37
F.	Studi Kasus: Globalisasi Budaya Populer dan Identitas Lokal di Indonesia.....	37
G.	Tugas.....	38
Pertemuan 7	Lingkungan Politik Domestik dan Internasional.....	39
A.	Lingkungan Politik Domestik dan Internasional	39
B.	Sistem Politik	39
C.	Pemerintahan: Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Masyarakat.....	40
D.	Partai Politik: Peran dan Pengaruh Partai dalam Politik Domestik	40
E.	Pemilihan Umum.....	41
F.	Isu Sosial dan Politik.....	41
G.	Studi Kasus: Lingkungan Politik Domestik dan Internasional terhadap Lingkungan Bisnis.....	41
H.	Tugas.....	43

Pertemuan 8 Lingkungan Teknologi.....	44
A. Lingkungan Teknologi.....	44
B. Inovasi Teknologi pada Masa Pra-Modern	45
C. Revolusi Industri dan Perkembangan Teknologi Modern.....	46
D. Era Digital dan Revolusi Teknologi Informasi.....	46
E. Studi Kasus: Lingkungan Teknologi terhadap Lingkungan Bisnis 47	
F. Tugas	48
Pertemuan 9 Lingkungan Alami.....	49
A. Lingkungan Alami	49
B. Pencemaran Lingkungan: Dampak Polusi Terhadap Ekosistem.	50
C. Kehilangan Habitat: Deforestasi dan Perubahan Penggunaan Lahan	51
D. Spesies Invasif dan Gangguan Ekologis Lainnya.....	51
E. Peran Lingkungan Alami dalam Lingkungan Bisnis	52
F. Studi Kasus: Dampak Lingkungan Alami terhadap Lingkungan Bisnis	53
G. Tugas	54
Pertemuan 10 Lingkungan Pemerintahan	55
A. Lingkungan Pemerintahan.....	55
B. Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	56
C. Peran dan Fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	56
D. Peran Parlemen dalam Proses Pembuatan Undang-Undang	57
E. Peran dan Fungsi Sistem Peradilan	58
F. Studi Kasus: Otonomi Daerah dan Iklim Investasi di Indonesia..	59
G. Tugas	60
Pertemuan 11 Presentasi dan Diskusi Makalah Akhir	61
Pertemuan 12 Presentasi dan Diskusi Makalah Akhir	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	67

Pertemuan 1

General Business Environment

A. Pengertian General Business Environment

Lingkungan bisnis umum (*general business environment*) merupakan seperangkat faktor eksternal yang memengaruhi operasional, strategi, dan keberhasilan suatu organisasi. Lingkungan ini bersifat dinamis, kompleks, serta tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor lingkungan bisnis menjadi prasyarat penting bagi pengambilan keputusan strategis yang tepat.

Dalam literatur manajemen strategis, *general business environment* dipandang sebagai kumpulan faktor eksternal yang secara sistematis membentuk peluang maupun ancaman bagi organisasi. Wheelen dan Hunger (2018) mendefinisikan lingkungan bisnis umum sebagai keseluruhan kondisi eksternal yang bersifat dinamis dan kompleks, yang memengaruhi pilihan strategis organisasi tanpa dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manajemen. Definisi ini memperlihatkan bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berada dalam konteks sosial, politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan lingkungan alam yang saling berkaitan.

Menurut Peter F. Drucker (1999), bisnis tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan selalu beroperasi dalam konteks lingkungan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas bisnis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan agar tetap kompetitif dan berkelanjutan.

B. Dimensi-Dimensi General Business Environment

Lingkungan bisnis umum mencakup beberapa dimensi penting yang lazim dianalisis menggunakan kerangka PESTEL (Political,

Economic, Social, Technological, Environmental, Legal). Kerangka ini membantu organisasi untuk memetakan kondisi eksternal secara sistematis:

1. Faktor Politik

Stabilitas pemerintahan, kebijakan fiskal, regulasi perdagangan, hingga hubungan internasional dapat berdampak langsung pada iklim usaha. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak investasi akan mendorong pertumbuhan sektor industri tertentu, sementara ketidakstabilan politik dapat meningkatkan risiko usaha.

2. Faktor Ekonomi

Kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), inflasi, tingkat suku bunga, kurs mata uang, serta daya beli masyarakat akan menentukan kelangsungan bisnis. Pada masa krisis moneter Asia tahun 1997–1998, banyak perusahaan di Indonesia mengalami kebangkrutan akibat lonjakan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

3. Faktor Sosial-Budaya

Perubahan demografi, nilai budaya, tingkat pendidikan, serta gaya hidup masyarakat berimplikasi langsung pada pola konsumsi. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, misalnya, telah meningkatkan permintaan terhadap produk-produk gaya hidup, pendidikan, dan pariwisata.

4. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi digital, otomasi, dan kecerdasan buatan memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan bersaing. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi dengan cepat cenderung lebih unggul, sementara yang lamban beradaptasi berisiko kehilangan pangsa pasar.

5. Faktor Alami

Isu perubahan iklim, ketersediaan energi, polusi, serta kelangkaan sumber daya alam semakin penting dalam menentukan keberlanjutan bisnis. Konsumen global kini semakin menuntut produk

yang ramah lingkungan, sehingga perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan prinsip *green business* dalam strategi mereka.

6. Faktor Hukum

Kepastian hukum, regulasi investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta undang-undang ketenagakerjaan menentukan stabilitas dan iklim usaha.

C. Dampak Lingkungan Bisnis terhadap Perkembangan Perusahaan

Lingkungan bisnis merupakan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi jalannya operasi sebuah perusahaan. Dalam kerangka akademis, lingkungan bisnis sering dipandang sebagai arena yang kompleks, dinamis, dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh organisasi. Perusahaan hanya bisa merespons, menyesuaikan diri, dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang muncul di dalamnya. Perubahan lingkungan inilah yang sering kali menjadi faktor penentu apakah sebuah perusahaan berkembang, bertahan, atau justru mengalami kemunduran.

Secara umum, lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Keduanya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap strategi, daya saing, serta keberlanjutan suatu organisasi. Memahami dampak dari kedua faktor ini menjadi suatu keharusan, sebab perusahaan tidak dapat beroperasi secara terisolasi; ia selalu berada dalam interaksi dengan berbagai variabel eksternal yang bersifat fluktuatif.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mencakup kondisi makroekonomi dan mikroekonomi yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan fiskal, dan fluktuasi nilai tukar (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar serta memperkenalkan produk baru. Sebaliknya,

ketika perekonomian melemah, konsumen akan lebih selektif dalam berbelanja, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa menurun (Kotler & Keller, 2016). Dalam kondisi tersebut, perusahaan dituntut menyesuaikan strategi, baik melalui efisiensi biaya, inovasi harga, maupun diversifikasi pasar.

Inflasi juga memengaruhi biaya operasional perusahaan. Kenaikan harga bahan baku, terutama yang bergantung pada impor, dapat menekan margin keuntungan bila tidak diimbangi strategi efisiensi (Mankiw, 2021). Tingkat suku bunga yang tinggi menambah beban biaya modal, sementara suku bunga rendah memberi peluang ekspansi. Selain itu, globalisasi ekonomi turut memperkuat persaingan internasional. Perubahan nilai tukar mata uang, perjanjian perdagangan, serta kondisi pasar global dapat membuka peluang sekaligus risiko bagi perusahaan lokal.

2. Faktor Non-Ekonomi

Selain faktor ekonomi, aspek non-ekonomi juga berperan penting dalam perkembangan perusahaan. Faktor ini mencakup aspek politik, hukum, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan alam.

Politik dan hukum memengaruhi stabilitas iklim usaha melalui regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan, dan peraturan perpajakan (Porter, 2008). Misalnya, kebijakan proteksi impor dapat menguntungkan produsen lokal, tetapi menyulitkan perusahaan yang bergantung pada bahan baku luar negeri. Stabilitas politik menciptakan rasa aman bagi investor, sedangkan ketidakstabilan politik menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat ekspansi bisnis (Hill, 2014).

Faktor sosial dan budaya berkaitan dengan perubahan gaya hidup, nilai, dan preferensi konsumen. Perusahaan yang mampu membaca tren sosial, seperti meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan atau keberlanjutan lingkungan, dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan inovasi produknya (Kotler & Keller, 2016). Jika diabaikan, produk perusahaan bisa kehilangan relevansi di mata konsumen.

Perkembangan teknologi merupakan faktor non-ekonomi yang paling disruptif dalam dekade terakhir. Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi, memasarkan produk, hingga melayani pelanggan. Perusahaan yang cepat beradaptasi dengan

teknologi digital lebih mampu bersaing, sedangkan yang lambat menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar (Christensen, 1997).

Selain itu, isu lingkungan alam dan keberlanjutan semakin menuntut perhatian. Perubahan iklim, bencana alam, dan tekanan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan memengaruhi citra perusahaan di mata publik. Organisasi yang aktif mengadopsi prinsip *sustainable business* cenderung memperoleh legitimasi sosial dan loyalitas konsumen yang lebih tinggi (Elkington, 1997).

D. Urgensi Keterampilan Analitis dalam Menyikapi Lingkungan Bisnis

Dalam dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, keterampilan analitis menjadi kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Lingkungan bisnis tidak lagi bersifat statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, regulasi pemerintah, tren sosial budaya, globalisasi, serta ketidakpastian pasar. Perubahan tersebut menciptakan suatu ekosistem bisnis yang penuh tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu, kemampuan analitis yang kuat menjadi kunci dalam memahami fenomena, menginterpretasikan data, serta mengambil keputusan strategis yang tepat.

Keterampilan analitis dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengurai kompleksitas, mengidentifikasi inti permasalahan, serta menyusun alternatif pemecahan masalah yang tepat melalui pemanfaatan data dan informasi yang tersedia. Seseorang yang memiliki keterampilan analitis mumpuni mampu melihat realitas bisnis tidak hanya dari permukaan, melainkan juga menggali pola dan keterkaitan yang tersembunyi di balik fenomena.

Lingkungan bisnis pada hakikatnya merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup aspek sumber daya manusia, struktur organisasi, serta budaya perusahaan, sedangkan faktor eksternal mencakup variabel-variabel seperti kondisi ekonomi, regulasi politik, perkembangan teknologi, hingga dinamika sosial masyarakat. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini menciptakan kondisi yang rumit sekaligus menantang. Tidak jarang, perusahaan yang gagal membaca perubahan lingkungan harus menghadapi konsekuensi berupa penurunan daya saing, hilangnya

pangsa pasar, bahkan kebangkrutan. Sebaliknya, organisasi yang mampu melakukan analisis secara tepat sering kali berhasil menemukan peluang baru yang sebelumnya tidak disadari oleh pesaingnya.

Dalam praktiknya, keterampilan analitis berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Di tengah derasnya arus informasi, seorang manajer tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman masa lalu. Informasi yang tersedia harus dipilah, ditafsirkan, dan dihubungkan dengan konteks spesifik perusahaan. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan manufaktur menghadapi fluktuasi harga bahan baku, keputusan untuk mengamankan pasokan melalui kontrak jangka panjang atau diversifikasi pemasok haruslah diambil berdasarkan analisis menyeluruh mengenai tren pasar global, kondisi ekonomi domestik, serta proyeksi permintaan konsumen. Tanpa keterampilan analitis yang memadai, keputusan semacam itu berpotensi salah arah dan menimbulkan kerugian besar. Keterampilan analitis juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi peluang dan ancaman yang ada di sekitar organisasi. Perubahan teknologi digital, misalnya, dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau konsumen lebih luas. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menghadirkan ancaman jika perusahaan tidak siap beradaptasi dengan model bisnis baru yang lebih inovatif. Dengan keterampilan analitis, perusahaan dapat menilai sejauh mana teknologi tertentu relevan untuk diadopsi, bagaimana dampaknya terhadap biaya operasional, serta apa implikasinya bagi strategi pemasaran. Analisis ini membantu organisasi bersikap proaktif, bukan reaktif, dalam menghadapi perubahan lingkungan.

E. Tugas

1. Cari definisi *General Business Environment* dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!
2. Jelaskan tentang faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap perkembangan bisnis!
3. Jelaskan tentang dampak faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap perkembangan bisnis

Pertemuan 2

Ekonomika Pembangunan dan Pembangunan Regional

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu proses multidimensional yang tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan nasional semata, tetapi juga melibatkan transformasi struktural, perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial. Todaro & Smith (2020) menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dalam arti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga perubahan mendasar dalam pola pikir, tata nilai, serta kemampuan suatu bangsa untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dipahami sebagai suatu rangkaian perubahan yang terencana dan berkesinambungan, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks sejarah, pembangunan ekonomi selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik domestik maupun global. Pembangunan ekonomi berfokus pada stabilisasi politik dan penyediaan infrastruktur dasar. Pada tahap ini, pembangunan lebih diarahkan pada penciptaan fondasi pertumbuhan melalui pembangunan sektor primer, seperti pertanian dan perkebunan, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat luas. Namun, seiring berjalannya waktu, fokus pembangunan bergeser menuju industrialisasi, diversifikasi ekonomi, dan integrasi dengan pasar global. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi bersifat dinamis serta dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal.

Pembangunan ekonomi juga memiliki dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan pendapatan nasional tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan apabila distribusinya tidak merata. Suatu negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun apabila ketimpangan pendapatan meningkat, maka hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumen Sen (1999) yang menekankan bahwa

pembangunan harus dilihat dari perspektif perluasan kapabilitas manusia. Artinya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana individu dalam masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak.

Selain itu, pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan aspek kelembagaan. Negara-negara yang berhasil mencapai pembangunan yang berkelanjutan umumnya memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, sistem hukum yang adil, serta kebijakan publik yang konsisten. North (1990) menegaskan bahwa institusi yang kuat menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena melalui institusi tersebut dapat diciptakan stabilitas politik, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks Indonesia, upaya memperkuat institusi terlihat dalam reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pengambilan keputusan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Di era globalisasi, pembangunan ekonomi tidak lagi dapat dipandang sebagai isu domestik semata. Arus perdagangan internasional, investasi asing, serta perkembangan teknologi digital telah menciptakan keterkaitan yang semakin erat antara perekonomian suatu negara dengan perekonomian global. Hal ini membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi membuka akses terhadap pasar internasional, transfer teknologi, dan sumber daya modal. Namun, di sisi lain, keterbukaan tersebut juga membuat perekonomian lebih rentan terhadap gejolak eksternal, seperti krisis finansial global atau fluktuasi harga komoditas. Oleh sebab itu, strategi pembangunan ekonomi modern harus mampu mengintegrasikan aspek daya saing global sekaligus ketahanan ekonomi domestik.

Pembangunan ekonomi juga sangat terkait dengan isu keberlanjutan. Paradigma pembangunan tradisional yang hanya menekankan pada pertumbuhan sering kali mengabaikan aspek lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, degradasi ekosistem, dan pencemaran lingkungan menjadi konsekuensi dari orientasi pembangunan yang semata-mata berorientasi pada output ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi konsep yang semakin relevan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian,

pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan juga harus memperhatikan keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang (WCED, 1987).

Dalam konteks bisnis, pembangunan ekonomi memainkan peran sentral dalam menentukan iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menciptakan permintaan pasar yang lebih besar, peluang investasi yang lebih luas, serta mendorong inovasi. Sebaliknya, stagnasi pembangunan dapat menurunkan kepercayaan investor, mempersempit lapangan kerja, dan memperburuk ketidakpastian bisnis. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun global, agar dapat merumuskan strategi bisnis yang adaptif.

Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai dimensi: ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, hingga lingkungan. Proses ini tidak bersifat instan, melainkan memerlukan perencanaan, komitmen, serta partisipasi dari seluruh aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Dengan mengintegrasikan aspek pertumbuhan, pemerataan, keberlanjutan, dan daya saing global, pembangunan ekonomi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.

B. Pembangunan Regional

Pembangunan regional merupakan salah satu aspek penting dalam kajian pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemerataan dan pengembangan wilayah. Secara konseptual, pembangunan regional dapat diartikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu, dengan memperhatikan potensi, karakteristik, dan permasalahan khas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Menurut Richardson (1978), pembangunan regional bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dalam skala nasional.

Di Indonesia, isu pembangunan regional sangat relevan mengingat kondisi geografis negara yang berbentuk kepulauan, dengan luas wilayah dan keberagaman yang tinggi. Perbedaan akses infrastruktur, tingkat pendidikan, kualitas tenaga kerja, dan struktur ekonomi antarwilayah menyebabkan adanya disparitas pembangunan. Jawa, misalnya, selama beberapa dekade menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sementara wilayah luar Jawa, seperti Maluku dan Papua, cenderung tertinggal. Ketimpangan ini memunculkan urgensi pembangunan regional sebagai strategi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Pembangunan regional tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya. Dari perspektif ekonomi, pembangunan regional menekankan pada optimalisasi potensi sektor unggulan di tiap wilayah, misalnya sektor pertanian di Jawa Tengah, perikanan di Sulawesi, atau pertambangan di Kalimantan. Dari sisi sosial, pembangunan regional mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Sedangkan dari perspektif politik, pembangunan regional berkaitan erat dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu indikator penting dalam pembangunan regional adalah tingkat pemerataan pembangunan antarwilayah. Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di satu wilayah akan menimbulkan masalah serius dalam jangka panjang, seperti urbanisasi berlebihan, kesenjangan pendapatan, dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan regional menekankan pada strategi redistribusi pertumbuhan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, serta peningkatan integrasi antarwilayah.

Strategi pembangunan regional dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan sektoral, yaitu mengembangkan sektor-sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi suatu daerah. Misalnya, pengembangan kawasan industri di Jawa Barat, pariwisata di Bali, atau perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Kedua, pendekatan spasial, yang menitikberatkan pada pembangunan wilayah secara fisik, seperti pembangunan jaringan transportasi, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan pusat logistik regional. Ketiga, pendekatan

kelembagaan, yakni memperkuat kapasitas pemerintah daerah, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dalam praktiknya, pembangunan regional juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti investasi asing, perdagangan internasional, dan perkembangan teknologi. Kehadiran investor global dalam pengembangan kawasan industri, misalnya, tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi daerah, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, tanpa regulasi yang tepat, investasi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan baru, misalnya dominasi investor asing atas sumber daya lokal. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam mengatur agar pembangunan regional tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

C. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengarahkan proses pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Secara konseptual, kebijakan pembangunan dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan, strategi, dan program yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan tersebut umumnya mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan stabilitas sosial dan politik. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan berfungsi sebagai pedoman bagi negara dalam mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Menurut Todaro & Smith (2020), kebijakan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga untuk menciptakan transformasi struktural dalam perekonomian, termasuk peralihan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier, modernisasi teknologi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya ekonomi semata, melainkan sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan lingkungan.

Kebijakan pembangunan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi ekonomi, yaitu kebijakan yang mendorong pertumbuhan melalui investasi, industrialisasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, dimensi sosial, yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan, akses pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Ketiga, dimensi politik, yang melibatkan penciptaan stabilitas politik, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keempat, dimensi lingkungan, yang memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian ekosistem.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan pembangunan perlu memperhatikan keempat dimensi ini agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Tanpa memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja berisiko menciptakan ketimpangan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi dasar penting dalam kebijakan pembangunan kontemporer.

D. Instrumen Kebijakan Pembangunan

Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan dijalankan melalui beragam instrumen, di antaranya:

1. Kebijakan Fiskal

Pemerintah menggunakan instrumen fiskal, seperti pengeluaran negara dan perpajakan, untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta subsidi bagi kelompok rentan. Kebijakan fiskal juga berperan dalam redistribusi pendapatan melalui program bantuan sosial.

2. Kebijakan Moneter

Bank sentral menjalankan kebijakan moneter dengan mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan dengan menciptakan kondisi makroekonomi yang stabil bagi investasi dan perdagangan.

3. Kebijakan Industri dan Sektoral

Melalui kebijakan industrialisasi, pemerintah mendorong pengembangan sektor-sektor strategis yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sektor manufaktur, energi, dan pariwisata. Kebijakan sektoral bertujuan memperkuat keunggulan

komparatif daerah melalui pengembangan sektor unggulan di masing-masing wilayah.

4. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial mencakup program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang produktif serta inklusif.

5. Kebijakan Lingkungan

Dalam era modern, kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Regulasi mengenai pengendalian polusi, konservasi sumber daya alam, serta transisi energi bersih merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

E. Globalisasi dan Dampaknya

Globalisasi memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi regional, terutama melalui peningkatan perdagangan internasional, arus investasi asing, serta transfer teknologi. Fitri et al. (2025) menemukan bahwa globalisasi telah mempercepat transformasi ekonomi regional di Indonesia dengan mendorong integrasi pasar serta pergeseran tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern.

Namun, globalisasi juga membawa risiko serius seperti ketimpangan antarwilayah, kerentanan terhadap gejolak pasar global, dan persaingan yang semakin ketat. Globalisasi dapat melemahkan ekonomi lokal jika tidak diimbangi dengan kebijakan proteksi, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kapasitas daerah.

F. Tantangan dan Peluang

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan regional, tantangan utama meliputi kesenjangan antarwilayah, keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, serta keterpaparan terhadap perubahan global. Sjafrizal (2014) menekankan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, pembangunan hanya akan terpusat di daerah tertentu, sehingga memperlebar jurang ketidakmerataan.

Di sisi lain, peluang besar dapat dimanfaatkan melalui digitalisasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, serta diversifikasi sektor unggulan. Penggunaan teknologi *Geographic Information System (GIS)*,

misalnya, memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan pembangunan berbasis data spasial yang lebih akurat dan responsif (Pardede & Warnars, 2010). Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan regional memerlukan pendekatan integratif yang mampu mengelola tantangan global sekaligus mengoptimalkan peluang lokal, agar tercapai pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

G. Tugas

1. Jelaskan tentang Pembangunan ekonomi dan Pembangunan regional dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!
2. Jelaskan tentang kebijakan Pembangunan di Indonesia!
3. Jelaskan tentang globalisasi dan dampaknya bagi perkembangan bisnis dan masyarakat sekitar
4. Jelaskan tantangan dan peluang di era globalisasi bagi perkembangan suatu bisnis!

Pertemuan 3

Kebijakan Moneter dan Fiskal

A. Konsep Push and Pull

Kebijakan moneter dan fiskal sering kali digambarkan melalui kerangka *push and pull* yang menunjukkan interaksi antara keduanya dalam mendorong (*push*) dan menahan atau menyeimbangkan (*pull*) aktivitas ekonomi. Menurut Blanchard (2017), kebijakan fiskal berfungsi sebagai *push factor* karena mampu meningkatkan permintaan agregat melalui belanja pemerintah dan stimulus fiskal, sedangkan kebijakan moneter berperan sebagai *pull factor* untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, ketika perekonomian mengalami resesi, kebijakan fiskal ekspansif dapat menjadi dorongan utama (*push*) bagi pemulihan melalui peningkatan belanja publik, sementara kebijakan moneter longgar melalui penurunan suku bunga bertindak sebagai *pull* yang mendorong investasi swasta (Mankiw, 2019). Dengan demikian, kerangka *push and pull* membantu menjelaskan peran saling melengkapi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga keseimbangan makroekonomi.

B. Ekonomi Moneter

Menurut Nopirin (1998) Ekonomi moneter merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran, fungsi, dan dampak uang dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi mencakup segala aktivitas yang mempengaruhi faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, produksi, harga, serta hubungan perdagangan dan pembayaran internasional.

Menurut Widina (2017) ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen vital dalam perekonomian modern. Masalah-masalah yang terkait dengan uang, lembaga keuangan, kredit, serta mekanisme yang melibatkan sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi

suatu negara memengaruhi proses produksi dan distribusi hasil kepada masyarakat. Tujuan utama dari ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, yang dapat diukur melalui terciptanya peluang kerja. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, produksi dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

C. Kebijakan Moneter

Menurut Warjiyo (2003) Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter atau bank sentral dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar untuk mencapai tujuan perkembangan ekonomi yang diinginkan. Dalam praktiknya, tujuan tersebut mencakup tercapainya stabilitas ekonomi makro, yang terlihat dari kestabilan harga (rendahnya inflasi), peningkatan pertumbuhan ekonomi (output riil), dan tersedianya cukup banyak lapangan pekerjaan. Kebijakan moneter berfungsi untuk mencapai struktur Tingkat suku bunga yang optimal, menemukan keseimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang, serta mendukung perekonomian yang sedang berkembang dengan mencegah terjadinya ketidakseimbangan yang tidak diinginkan.

Menurut Mankiw (2006:209-211) kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain:

1. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka (open market operation) adalah alat kebijakan yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Keputusan untuk membeli atau menjual surat berharga tersebut diambil oleh bank sentral berdasarkan kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Jika jumlah uang beredar meningkat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ketika terjadi overemployment, bank sentral akan menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, yang akan menyebabkan penurunan tabungan giral masyarakat serta cadangan bank-bank umum.

2. Suku Bunga Diskonto

Bank umum membutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitasnya dan berkembang. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, bank umum akan kesulitan untuk tumbuh. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat adalah dengan memastikan bahwa bank dapat menyediakan dana yang dapat ditarik oleh nasabah. Jika bank umum mengalami kekurangan dana, mereka bisa meminjam dana dari bank sentral. Dalam memberikan pinjaman tersebut, bank sentral menetapkan tingkat bunga diskonto yang berlaku. Tingkat diskonto ini menjadi salah satu alat bagi bank sentral untuk mengendalikan perekonomian. Ketika perekonomian menurun, bank sentral cenderung menurunkan tingkat diskonto, yang dapat mendorong bank umum untuk meminjam lebih banyak dana karena beban bunga menjadi lebih rendah. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami overemployment, bank sentral akan meningkatkan tingkat diskonto. Kenaikan tingkat diskonto ini akan mengurangi insentif bagi bank umum untuk meminjam dana lebih banyak dari bank sentral.

3. Tingkat Cadangan Wajib

Kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank umum dapat mengurangi efektivitas instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto. Untuk mengatasi masalah ini, bank sentral dapat memberlakukan kewajiban bagi bank-bank umum untuk meningkatkan persentase cadangan wajib yang harus disetorkan ke bank sentral. Dengan cara ini, kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank umum dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Setelah itu, instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto akan lebih efektif dalam fungsinya. Dalam kondisi perekonomian yang menurun, bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib, sedangkan dalam situasi overemployment, bank sentral akan menaikkan persentase cadangan wajib yang harus disetorkan oleh bank-bank umum.

D. Kebijakan Fiskal

Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan

perekonomian serta digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian, sedangkan untuk kebijakan fiskal sendiri adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran.

Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes, yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara.

Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur oleh beberapa faktor, salah satunya termasuk produk domestik bruto (PDB), yang merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam setahun. Faktor lainnya adalah permintaan agregat, yang merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara yang dibeli pada titik harga tertentu.

1. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan program agar menjaga setiap warganya tetap dalam keadaan ekonomi yang baik. Kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan yang dibuat biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi dan harga yang stabil.

❖ Pertumbuhan Ekonomi

Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung mendapatkan lebih banyak pendapatan. Tentunya ini juga meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Mengurangi pajak adalah cara pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang cenderung meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis, yang mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

❖ **Pekerjaan**

Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Pengangguran pekerja cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi.

❖ **Stabilitas Ekonomi**

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global, atau “booming,” diikuti oleh perlambatan ekonomi, atau “busts.” Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini untuk mengendalikan ekspansi berlebihan yang dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti inflasi tinggi dengan meningkatkan pajak dan pemangkasan pengeluaran. Intinya, pemerintah dapat mencoba memuluskan tren boom dan bust untuk mencapai tren pertumbuhan ekonomi konstan yang lebih stabil.

2. Jenis Kebijakan Fiskal

Ada dua jenis utama kebijakan fiskal: ekspansif dan kontraktif. Berikut adalah penjelasannya :

- ❖ Kebijakan fiskal ekspansif, dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan Ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi.
- ❖ Kebijakan fiskal kontraksional digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran.

E. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai tujuan makroekonomi, seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, pengendalian inflasi, serta stabilitas sistem keuangan.

Menurut International Monetary Fund (IMF, 2020), sinergi antara bank sentral dan otoritas fiskal dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menghadapi guncangan eksternal, misalnya krisis keuangan global atau pandemi.

Dalam praktiknya, koordinasi dilakukan dengan memastikan bahwa kebijakan fiskal ekspansif tidak menimbulkan beban inflasi berlebih yang menyulitkan bank sentral, sementara kebijakan moneter tidak terlalu ketat hingga melemahkan stimulus fiskal. Di Indonesia, misalnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan diwujudkan dalam *Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)* yang berfungsi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara terintegrasi (Bank Indonesia, 2021).

F. Tantangan dalam Menyelaraskan Kebijakan Moneter dan Fiskal

Meskipun koordinasi kebijakan sangat diharapkan, terdapat berbagai tantangan dalam menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, adanya perbedaan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintah sering kali lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja fiskal, sedangkan bank sentral berfokus pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi (Taylor, 2019).

Kedua, keterbatasan fiskal akibat tingginya beban utang dapat mengurangi ruang bagi pemerintah untuk melakukan stimulus, sementara di sisi lain kebijakan moneter longgar dapat kehilangan efektivitasnya jika tidak didukung kebijakan fiskal yang sehat (IMF, 2020). Ketiga, dinamika politik dan siklus elektoral sering kali memengaruhi kebijakan fiskal, sehingga menyulitkan tercapainya konsistensi dengan kebijakan moneter (Alesina & Tabellini, 2005).

G. Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Lingkungan Bisnis

Kebijakan moneter dan fiskal memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan bisnis. Keduanya membentuk kerangka makroekonomi yang menentukan iklim usaha, stabilitas pasar, dan daya saing perusahaan.

1. Dampak Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh bank sentral memengaruhi dunia usaha terutama melalui suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Menurut Mishkin (2019), penurunan suku bunga dapat meningkatkan akses kredit sehingga mendorong ekspansi bisnis, sedangkan kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman dan menurunkan minat investasi.

Selain itu, stabilitas inflasi memberikan kepastian dalam perencanaan usaha. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli konsumen, sementara inflasi tinggi menciptakan ketidakpastian harga input dan output (Blanchard, 2017). Stabilitas nilai tukar juga menjadi faktor penting, khususnya bagi perusahaan yang terlibat dalam ekspor-impor. Fluktuasi kurs yang tajam menimbulkan risiko pada biaya produksi dan penerimaan penjualan internasional.

2. Dampak Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memengaruhi dunia usaha melalui mekanisme belanja publik dan perpajakan. Menurut Mankiw (2019), belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menciptakan permintaan agregat serta meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya memperluas peluang usaha.

Di sisi lain, kebijakan perpajakan dapat menimbulkan insentif maupun hambatan. Keringanan pajak mendorong investasi dan inovasi, sementara tarif pajak yang tinggi tanpa kompensasi berpotensi melemahkan daya saing perusahaan.

H. Studi Kasus: Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021 menjadi masalah serius bagi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Dampak pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga, serta tekanan besar pada sektor bisnis dan keuangan. Dalam situasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pemulihan.

1. Kebijakan Moneter

Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI-7DRR hingga level terendah 3,5% (2021), menyediakan likuiditas

perbankan melalui quantitative easing, serta melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk membantu pembiayaan APBN sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan (Bank Indonesia, 2021).

2. Kebijakan Fiskal

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 695 triliun pada tahun 2020. Belanja fiskal diarahkan untuk:

- subsidi gaji bagi pekerja,
- bantuan sosial tunai,
- dukungan modal bagi UMKM,
- serta insentif pajak bagi dunia usaha.

Langkah ini merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kelangsungan usaha (Kementerian Keuangan RI, 2020).

I. Tugas

1. Jelaskan definisi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!
2. Jelaskan strategi push and pull pada kebijakan moneter beserta contohnya!
3. Jelaskan tantangan-tantangan dalam menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal! Dan analisis dampaknya terhadap perkembangan bisnis!

Pertemuan 4

Kebijakan Industri dan Sektoral

A. Konsep Kebijakan Industri dan Sektoral

Kebijakan industri dan sektoral merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengatur, dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Secara umum, kebijakan ini dapat dipahami sebagai serangkaian strategi, regulasi, dan program pemerintah yang dirancang untuk mendorong perkembangan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, terutama sektor industri yang dianggap strategis bagi pertumbuhan, pemerataan, dan daya saing nasional.

Menurut Lin (2012), kebijakan industri merupakan intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mendorong transformasi struktural dari sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor-sektor berproduktivitas tinggi, seperti manufaktur dan teknologi. Dengan demikian, kebijakan industri tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan diversifikasi ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer.

1. Landasan Teoritis Kebijakan Industri

Dalam literatur ekonomi pembangunan, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami kebijakan industri, yaitu kebijakan industri horizontal dan kebijakan industri vertikal.

❖ Kebijakan Industri Horizontal

Kebijakan ini bersifat umum dan tidak ditujukan pada sektor tertentu. Contohnya adalah kebijakan peningkatan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan kerangka hukum dan institusi. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua sektor sehingga setiap industri memiliki kesempatan berkembang secara optimal.

❖ Kebijakan Industri Vertikal

Berbeda dengan pendekatan horizontal, kebijakan vertikal secara spesifik menargetkan sektor atau industri tertentu yang dianggap strategis atau memiliki keunggulan komparatif. Misalnya, pengembangan industri otomotif, tekstil, elektronik, atau energi terbarukan. Pemerintah memberikan dukungan khusus melalui subsidi, insentif pajak, perlindungan tarif, atau kemudahan akses pembiayaan.

B. Indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam Konteks Industri

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan kebijakan industri. Dalam konteks ini, pertumbuhan dapat dilihat melalui kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor barang manufaktur. Menurut Todaro & Smith (2020), industrialisasi yang terencana dan berkelanjutan merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi modern karena sektor industri memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi terhadap sektor lain, seperti jasa, transportasi, dan pertanian.

Di Indonesia, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB masih menempati posisi penting, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren penurunan share industri manufaktur terhadap PDB. Hal ini menandakan adanya kebutuhan untuk memperkuat strategi reindustrialisasi melalui program-program seperti *Making Indonesia 4.0*, yang berfokus pada pengembangan industri prioritas seperti makanan dan minuman, otomotif, tekstil, elektronik, serta kimia (Kementerian Perindustrian RI, 2021).

Indikator lainnya adalah peningkatan investasi asing langsung (*foreign direct investment/ FDI*), yang mencerminkan daya tarik sektor industri suatu negara. Negara dengan iklim bisnis kondusif, regulasi yang jelas, serta infrastruktur memadai cenderung lebih berhasil dalam menarik FDI, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

C. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi

Produktivitas dan efisiensi merupakan kunci dalam memperkuat kinerja industri. Menurut Krugman (1994), dalam jangka panjang, pertumbuhan produktivitas lebih penting daripada akumulasi modal karena produktivitas menentukan kemampuan negara untuk

meningkatkan standar hidup masyarakat. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui adopsi teknologi modern, investasi dalam penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*), serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Efisiensi dalam konteks industri berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Penerapan teknologi digital dan otomatisasi dalam era Revolusi Industri 4.0 memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi proses produksi, menekan biaya, serta memperbaiki kualitas produk. Namun, peningkatan efisiensi juga menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan pergeseran ke arah ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Indonesia menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih mendominasi struktur ekonomi. Meskipun jumlah UMKM besar, kontribusi produktivitasnya relatif kecil dibandingkan perusahaan besar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi UMKM, akses pembiayaan, serta integrasi dengan rantai pasok global menjadi strategi penting untuk mendorong efisiensi dan produktivitas nasional (World Bank, 2019).

D. Peningkatan Daya Saing Global

Daya saing global suatu industri ditentukan oleh kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, berbiaya kompetitif, serta mampu memenuhi standar internasional. Menurut Porter (1990) dalam konsep *Diamond Model of National Advantage*, daya saing industri dipengaruhi oleh empat faktor utama: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan domestik, industri terkait dan pendukung, serta strategi, struktur, dan rivalitas perusahaan.

Dalam era globalisasi, daya saing tidak hanya ditentukan oleh faktor biaya, tetapi juga oleh inovasi, kualitas produk, keberlanjutan, serta kecepatan adaptasi terhadap perubahan pasar. Negara-negara maju telah menggeser fokus daya saing ke arah teknologi hijau (*green technology*), digitalisasi, dan ekonomi berbasis inovasi. Oleh karena itu, industri nasional yang ingin bertahan dan berkembang di pasar internasional harus mengadopsi standar keberlanjutan, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kemampuan inovasi.

Indonesia memiliki potensi besar dalam peningkatan daya saing global, terutama melalui pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi ekonomi, serta penguatan sektor pariwisata dan kreatif. Namun, hambatan berupa birokrasi, kualitas infrastruktur, dan keterbatasan riset masih menjadi tantangan utama. OECD (2020) menekankan bahwa peningkatan daya saing suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan dalam membangun ekosistem inovasi yang didukung oleh kebijakan industri progresif, regulasi yang transparan, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi.

E. Studi Kasus: Kebijakan Industri dan Sektoral di Indonesia

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan program "Making Indonesia 4.0," yang merupakan upaya strategis untuk mengakselerasi transformasi digital di sektor industri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global melalui adopsi teknologi canggih, seperti otomasi, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT). Dengan populasi yang besar dan pasar yang berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan industri di Asia Tenggara.

1. Kelebihan Kebijakan

Kelebihan dari kebijakan ini antara lain terletak pada potensinya dalam mendorong peningkatan daya saing global melalui efisiensi produksi, peningkatan kualitas produk, dan percepatan inovasi. Selain itu, fokus pada lima sektor prioritas yakni makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian, elektronik, serta kimia memberikan peluang bagi diversifikasi ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Program ini juga mampu menciptakan peluang kerja baru di bidang teknologi, riset, dan ekonomi kreatif, serta menarik investasi asing yang lebih besar ke sektor manufaktur modern. Di samping itu, *Making Indonesia 4.0* berpotensi memperkuat hilirisasi sumber daya alam, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia.

2. Kelemahan Kebijakan

Implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah kelemahan dan tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan teknologi, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih terbatas dalam hal modal, literasi digital, serta akses infrastruktur. Infrastruktur

digital yang belum merata, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, juga menjadi penghambat utama dalam adopsi teknologi. Selain itu, kualitas tenaga kerja Indonesia masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan kebutuhan industri berbasis teknologi, karena kesenjangan keterampilan dapat menimbulkan masalah *skills mismatch* (World Bank, 2019). Kelemahan lain terletak pada minimnya investasi riset dan pengembangan (R&D), yang menyebabkan inovasi dalam negeri berjalan lambat, serta tingginya ketergantungan pada teknologi asing, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak.

F. Tugas

1. Jelaskan definisi kebijakan industri dan sektoral dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!
2. Jelaskan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dalam konteks industri!
3. Jelaskan bagaimana meningkatkan daya saing global pada industri dan sektoral!
4. Jelaskan dampak kebijakan industry dan sectoral terhadap perkembangan bisnis!

Pertemuan 5

Lingkungan Demografi

A. Konsep Lingkungan Demografi

Lingkungan demografi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika bisnis dan pembangunan ekonomi. Demografi mencakup berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, struktur umur, tingkat kelahiran, mortalitas, urbanisasi, migrasi, serta distribusi geografis penduduk. Menurut Todaro dan Smith (2020), perubahan demografi dapat menjadi kekuatan pendorong maupun penghambat pembangunan karena secara langsung berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja, pola konsumsi, dan kebutuhan sosial-ekonomi. Dengan demikian, pemahaman mengenai kondisi demografi menjadi krusial bagi pemerintah maupun sektor bisnis dalam merumuskan strategi pembangunan dan perencanaan pasar.

B. Kebijakan Demografi yang Efektif

Kebijakan demografi yang efektif merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam mengelola dinamika pertumbuhan dan struktur penduduk. Tujuan utama kebijakan ini adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan nasional, sehingga tercipta masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berdaya saing. Menurut United Nations Population Fund (2021), kebijakan demografi yang ideal harus berfokus pada tiga aspek utama, yakni pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan distribusi penduduk melalui pembangunan wilayah.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan demografi diwujudkan melalui berbagai program, antara lain program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan tingkat kelahiran, investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur di daerah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Upaya ini tidak hanya bertujuan menciptakan keseimbangan jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia,

tetapi juga memastikan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

C. Rekomendasi untuk Menangani Tantangan Demografi

Tantangan demografi di Indonesia, seperti tingginya angka kelahiran di beberapa wilayah, meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, serta pesatnya urbanisasi, memerlukan strategi kebijakan yang terintegrasi. Pertama, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja agar penduduk usia produktif memiliki daya saing dalam pasar tenaga kerja global. Kedua, perlu adanya sistem jaminan sosial dan kesehatan yang inklusif untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah lansia. Ketiga, pembangunan infrastruktur harus diperluas ke wilayah luar Jawa guna mengurangi ketimpangan migrasi dan urbanisasi.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam menyediakan lapangan kerja berbasis teknologi dan inovasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Bloom et al. (2015) yang menekankan bahwa keberhasilan suatu negara dalam mengelola demografi sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah pertumbuhan penduduk menjadi modal produktif melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan.

D. Dampak Lingkungan Demografi terhadap Lingkungan Bisnis

Lingkungan demografi memberikan pengaruh langsung terhadap strategi bisnis dan dinamika pasar. Pertumbuhan jumlah penduduk usia muda menciptakan permintaan tinggi terhadap produk digital, hiburan, transportasi, serta pendidikan. Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk usia lanjut membuka peluang bagi pengembangan industri kesehatan, farmasi, perawatan lansia, serta asuransi jiwa. Urbanisasi memperluas pasar perkotaan yang mendorong pertumbuhan sektor properti, ritel modern, dan transportasi publik.

Namun, jika dinamika demografi tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menimbulkan tekanan pada dunia usaha. Misalnya, tingginya angka pengangguran akibat *skills mismatch* akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga memengaruhi stabilitas pasar. Demografi yang tidak terkendali juga dapat meningkatkan biaya sosial, seperti kesehatan dan jaminan sosial, yang pada akhirnya membebani anggaran pemerintah dan menciptakan ketidakpastian dalam iklim bisnis.

E. Studi Kasus: Bonus Demografi

Indonesia saat ini tengah menghadapi periode bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2035, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai sekitar 70% dari total populasi (Bappenas, 2020). Kondisi ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai rata-rata 6–7% per tahun (McKinsey Global Institute, 2019).

Tingginya proporsi penduduk usia produktif berimplikasi terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa. Generasi muda sebagai kelompok konsumen utama cenderung adaptif terhadap inovasi, teknologi digital, dan gaya hidup modern. Hal ini menciptakan peluang bagi berkembangnya industri berbasis teknologi, e-commerce, keuangan digital, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Dengan demikian, bonus demografi dapat menjadi katalisator pertumbuhan pasar domestik yang lebih dinamis dan berorientasi pada kebutuhan generasi produktif (McKinsey Global Institute, 2019).

Namun, bonus demografi juga menimbulkan tantangan yang cukup kompleks bagi lingkungan bisnis. Apabila pertumbuhan tenaga kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas, maka akan terjadi peningkatan pengangguran dan *underemployment*, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini dapat menekan tingkat permintaan dan melemahkan pasar domestik. Lebih jauh, adanya ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*) antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja berpotensi menurunkan produktivitas dan memperbesar biaya pelatihan bagi perusahaan (World Bank, 2020).

F. Tugas

1. Jelaskan definisi lingkungan demografi dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!
2. Jelaskan tentang kebijakan-kebijakan demografi yang efektif!
3. Jelaskan tentang tantangan dan peluang pada lingkungan demografi!
4. Jelaskan dampak lingkungan demografi terhadap perkembangan bisnis, berikan contoh kasus di Indonesia!

Pertemuan 6

Lingkungan Sosial dan Budaya

A. Konsep Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya merupakan salah satu determinan penting dalam analisis lingkungan bisnis. Aspek sosial meliputi nilai-nilai, norma, kebiasaan, perilaku masyarakat, serta pola hubungan sosial yang berkembang dalam suatu komunitas. Sementara itu, budaya mencakup sistem kepercayaan, bahasa, adat istiadat, simbol, serta gaya hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Hofstede (2011), budaya berfungsi sebagai kerangka acuan yang memengaruhi cara individu berinteraksi, membuat keputusan, dan merespons perubahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan sosial dan budaya sangat penting bagi dunia usaha dalam menyusun strategi pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan adaptasi organisasi.

B. Dinamika Sosial dan Perubahan Nilai

Perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari modernisasi, globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan demografi. Misalnya, urbanisasi yang cepat telah mendorong lahirnya masyarakat perkotaan dengan pola konsumsi yang berbeda dari masyarakat pedesaan. Selain itu, meningkatnya tingkat pendidikan dan akses informasi membuat masyarakat semakin kritis dalam menilai kualitas produk maupun etika perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Kotler & Keller, 2016).

C. Peran Lingkungan Sosial dan Budaya dalam Lingkungan Bisnis

Lingkungan sosial dan budaya memiliki peran yang fundamental dalam membentuk dinamika bisnis, karena keduanya memengaruhi perilaku konsumen, praktik manajerial, serta strategi perusahaan dalam merespons perubahan pasar. Menurut Hofstede (2011), budaya

merupakan kerangka acuan yang mengatur cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi dalam masyarakat tertentu tidak dapat melepaskan diri dari nilai, norma, serta kebiasaan sosial-budaya yang berlaku.

Pertama, peran sosial dan budaya terlihat dalam membentuk preferensi konsumen. Selera terhadap produk dan jasa sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti gaya hidup, adat istiadat, dan sistem kepercayaan. Misalnya, dalam masyarakat yang menempatkan nilai tinggi pada aspek religiusitas, produk halal memiliki posisi strategis dan menjadi salah satu segmen pasar yang terus berkembang di Indonesia. Dengan memahami budaya lokal, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran sehingga produk lebih mudah diterima masyarakat.

Kedua, lingkungan sosial dan budaya berperan dalam pengelolaan tenaga kerja dan organisasi. Nilai-nilai budaya menentukan pola komunikasi, gaya kepemimpinan, serta etos kerja. Misalnya, budaya kolektivistik yang menekankan kerja sama dan harmoni mendorong penerapan gaya kepemimpinan partisipatif, sedangkan budaya individualistik cenderung menekankan penghargaan atas pencapaian individu. Perusahaan multinasional yang tidak memahami keragaman budaya sering kali menghadapi hambatan dalam koordinasi dan manajemen sumber daya manusia lintas negara (Trompenaars & Hampden-Turner, 2012).

Ketiga, lingkungan sosial-budaya juga memengaruhi legitimasi dan keberlanjutan bisnis. Masyarakat modern semakin kritis terhadap isu etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Konsumen tidak hanya menilai kualitas produk, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kontribusinya terhadap komunitas. Dengan demikian, keberhasilan bisnis jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang berlaku (Kotler & Keller, 2016).

D. Dampak Globalisasi terhadap Identitas Lokal

Globalisasi membawa arus pertukaran budaya, nilai, dan gaya hidup yang begitu cepat sehingga memengaruhi cara masyarakat memandang identitas lokal. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang untuk memperkaya kebudayaan melalui integrasi nilai-nilai universal

seperti keterbukaan, inovasi, dan kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, arus budaya global sering kali menimbulkan homogenisasi yang berpotensi melemahkan tradisi lokal, bahasa daerah, serta nilai-nilai kearifan yang telah lama menjadi ciri khas suatu komunitas (Ritzer, 2011).

Dalam konteks bisnis, globalisasi menciptakan peluang untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk lokal ke kancan internasional. Contohnya, batik Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia telah dipromosikan melalui industri mode global. Akan tetapi, tantangan muncul ketika budaya lokal terpinggirkan oleh dominasi budaya asing yang lebih populer, sehingga produk dan identitas lokal harus berjuang untuk tetap relevan. Dengan demikian, pengelolaan globalisasi harus disertai strategi pelestarian identitas lokal agar keberagaman tetap terjaga.

E. Teknologi dan Komunikasi: Perubahan dalam Komunikasi dan Interaksi Sosial

Kemajuan teknologi komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Komunikasi tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, melainkan berlangsung secara instan dan global. Menurut Castells (2010), era *network society* memungkinkan terbentuknya jaringan sosial lintas batas geografis yang mengubah pola interaksi manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Dalam konteks bisnis, perubahan ini berdampak signifikan terhadap strategi pemasaran dan hubungan dengan konsumen. Perusahaan kini dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial, memanfaatkan *big data* untuk memahami preferensi konsumen, dan membangun citra merek secara digital. Namun, dampak negatif juga muncul, seperti berkurangnya interaksi tatap muka, meningkatnya risiko disinformasi, serta ketergantungan pada teknologi yang dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial. Dengan demikian, teknologi komunikasi berperan ganda sebagai fasilitator inovasi sekaligus tantangan dalam menjaga kualitas interaksi sosial.

F. Studi Kasus: Globalisasi Budaya Populer dan Identitas Lokal di Indonesia

Salah satu dampak globalisasi terhadap lingkungan sosial dan budaya di Indonesia adalah budaya populer Korea Selatan (*K-Pop* dan *K-*

Drama). Fenomena ini menunjukkan bagaimana globalisasi budaya mampu membentuk preferensi generasi muda dalam hal musik, fashion, hingga gaya hidup. Industri hiburan Korea telah berhasil memanfaatkan teknologi digital dan strategi komunikasi global untuk memperluas jangkauan pasar.

Bagi dunia bisnis di Indonesia, fenomena ini menciptakan peluang besar, seperti meningkatnya penjualan produk kosmetik, fashion, dan makanan Korea. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa dominasi budaya asing dapat menggeser minat generasi muda terhadap budaya lokal, seperti wayang, gamelan, atau kuliner tradisional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berbagai pihak mulai mengembangkan strategi *glocalization*, yaitu mengadaptasi unsur global dengan identitas lokal. Misalnya, munculnya tren *K-Pop dance cover* dengan sentuhan budaya Nusantara atau promosi kuliner lokal melalui media sosial dengan gaya populer ala konten global.

Studi kasus ini menegaskan bahwa globalisasi tidak selalu berarti hilangnya identitas lokal, melainkan dapat menjadi ruang kolaborasi antara nilai global dan lokal. Dengan strategi yang tepat, identitas lokal justru dapat diperkuat melalui adaptasi terhadap arus global yang dinamis.

G. Tugas

1. Jelaskan definisi lingkungan sosial dan budaya dari berbagai sumber dan referensinya!
2. Jelaskan tentang dampak globalisasi terhadap identitas lokal!
3. Jelaskan peran teknologi dan komunikasi terhadap perubahan dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta dampaknya terhadap perkembangan bisnis!

Pertemuan 7

Lingkungan Politik Domestik dan Internasional

A. Lingkungan Politik Domestik dan Internasional

Dalam dinamika dunia bisnis modern, faktor politik memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan aspek ekonomi maupun sosial. Politik, baik pada tataran domestik maupun internasional, membentuk kerangka aturan, kebijakan, serta stabilitas yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi aktivitas usaha. Di tingkat domestik, arah kebijakan pemerintah, kualitas tata kelola, dan stabilitas politik menentukan sejauh mana iklim investasi dapat berkembang. Sementara itu, pada tingkat internasional, hubungan diplomatik antarnegara, keberadaan organisasi global, serta dinamika geopolitik sering kali menjadi faktor kunci yang memengaruhi aliran modal, perdagangan, dan kompetisi antar pelaku bisnis.

Bagi pelaku usaha, memahami lingkungan politik bukan sekadar kebutuhan analisis eksternal, tetapi juga menjadi strategi untuk bertahan dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Perusahaan yang mampu membaca arah kebijakan pemerintah atau mengantisipasi risiko geopolitik global akan lebih siap dalam merancang strategi bisnis yang adaptif. Dengan demikian, analisis politik tidak hanya menjadi wacana akademis, tetapi juga instrumen praktis untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dinamika politik domestik maupun internasional.

B. Sistem Politik

Sistem politik merupakan kerangka kelembagaan yang mengatur distribusi kekuasaan, pengambilan keputusan, serta mekanisme hubungan antara negara dengan masyarakat. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda, bergantung pada ideologi, konstitusi, dan tradisi politik yang dianut. Menurut Almond dan Powell (1988), sistem politik dapat dipahami sebagai seperangkat interaksi yang berfungsi untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks bisnis, sistem politik menjadi faktor penentu stabilitas lingkungan usaha. Negara dengan sistem politik yang stabil dan transparan cenderung menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara sistem politik yang rapuh sering kali menimbulkan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem politik suatu negara sangat penting bagi pelaku bisnis untuk merumuskan strategi yang sesuai.

C. Pemerintahan: Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Masyarakat

Pemerintahan berperan sebagai aktor utama dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Fungsi utamanya meliputi regulasi, penyediaan pelayanan publik, perlindungan masyarakat, serta penciptaan iklim ekonomi yang stabil. Pemerintah juga bertindak sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pelaku ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun hukum (Rosenbloom, 2014).

Dalam perspektif bisnis, pemerintah memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, ia bertindak sebagai fasilitator melalui penyediaan infrastruktur dan kebijakan pro-bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga bertindak sebagai regulator yang menetapkan batasan-batasan hukum untuk menjamin persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Partai Politik: Peran dan Pengaruh Partai dalam Politik Domestik

Partai politik merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Menurut Duverger (1954), partai politik berfungsi sebagai organisasi yang bertujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara konstitusional. Dalam praktiknya, partai politik memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan publik melalui mekanisme legislatif dan eksekutif.

Bagi dunia bisnis, keberadaan partai politik dapat memberikan pengaruh signifikan. Orientasi ideologi partai, platform ekonomi, serta komitmen terhadap investasi asing sering kali menjadi pertimbangan investor. Pergantian partai berkuasa dapat membawa perubahan arah

kebijakan ekonomi, sehingga pelaku bisnis perlu memahami dinamika partai politik untuk memitigasi risiko.

E. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan politik suatu negara. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi. Menurut Huntington (1991), keberlangsungan pemilu yang bebas dan adil merupakan fondasi utama konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks ekonomi, pemilu sering kali menimbulkan ketidakpastian jangka pendek karena potensi perubahan kebijakan. Namun, pemilu juga membuka peluang bagi munculnya pemimpin baru yang membawa program reformasi ekonomi. Bagi pelaku bisnis, periode pemilu menuntut kewaspadaan sekaligus kesiapan adaptasi terhadap arah kebijakan yang mungkin berubah pasca pemilihan.

F. Isu Sosial dan Politik

Isu sosial dan politik merupakan faktor dinamis yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan lingkungan bisnis. Isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, korupsi, gerakan sosial, hingga tuntutan keadilan gender sering kali menjadi bagian dari diskursus politik nasional. Menurut Norris (2002), isu-isu politik modern tidak lagi terbatas pada persoalan distribusi kekuasaan, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, identitas, dan keadilan.

Dalam dunia bisnis, isu sosial dan politik dapat menciptakan peluang sekaligus risiko. Misalnya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan (*green business*). Sebaliknya, isu korupsi dan ketidakadilan dapat menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, perusahaan harus responsif terhadap isu sosial dan politik agar mampu menjaga legitimasi serta daya saingnya di pasar.

G. Studi Kasus: Lingkungan Politik Domestik dan Internasional terhadap Lingkungan Bisnis

Lingkungan politik, baik domestik maupun internasional, memiliki keterkaitan erat dengan dinamika dunia usaha. Politik tidak

hanya menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga membentuk stabilitas, kepastian hukum, serta peluang investasi. Studi kasus berikut menggambarkan bagaimana faktor politik memengaruhi lingkungan bisnis di Indonesia, baik dari sisi kebijakan nasional maupun dinamika global.

Pada tingkat domestik, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada tahun 2020 menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi regulasi ekonomi Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menyederhanakan perizinan usaha, menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Dari perspektif dunia bisnis, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa efisiensi birokrasi, pengurangan biaya kepatuhan, serta meningkatnya minat investor asing. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan resistensi sosial dari kelompok buruh yang menilai adanya ketidakadilan dalam regulasi ketenagakerjaan. Ketegangan sosial yang muncul menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari legitimasi politik dan penerimaan masyarakat. Dengan demikian, meskipun Omnibus Law memperbaiki aspek teknis investasi, stabilitas politik domestik tetap menjadi syarat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada tingkat internasional, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 menjadi contoh nyata bagaimana politik global memengaruhi bisnis di negara lain, termasuk Indonesia. Kenaikan tarif impor yang diberlakukan kedua negara menyebabkan gangguan pada rantai pasok global dan menciptakan ketidakpastian di pasar internasional. Bagi Indonesia, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia berpotensi menarik investasi dari perusahaan multinasional yang mencari lokasi produksi alternatif di luar Tiongkok. Beberapa kawasan industri mulai dilirik sebagai pusat manufaktur baru. Di sisi lain, ketergantungan industri lokal pada bahan baku impor dari Tiongkok menimbulkan kenaikan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk nasional.

Jika dibandingkan, kedua studi kasus tersebut menunjukkan bahwa politik domestik lebih berpengaruh pada kepastian regulasi dan iklim usaha dalam negeri, sedangkan politik internasional lebih menentukan stabilitas rantai pasok dan akses pasar global. Keduanya saling melengkapi dan menciptakan lanskap bisnis yang penuh dinamika. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi adaptif, baik melalui pemahaman regulasi nasional maupun melalui diversifikasi

pasar dan rantai pasok global. Dengan langkah tersebut, risiko politik dapat diminimalkan, sementara peluang dari perubahan politik dapat dimanfaatkan secara optimal.

H. Tugas

1. Jelaskan definisi lingkungan politik domestik dan lingkungan politik internasional dari berbagai sumber referensi minimal 3 referensi!
2. Jelaskan peran dan fungsi pemerintahan dalam Masyarakat!
3. Jelaskan peran dan pengaruh partai dalam politik domestik!
4. Berikan contoh issue sosial dan politik baik dalam politik domestic maupun politik internasional, masing-masing satu contoh! Dan analisis dampaknya terhadap perkembangan suatu bisnis!

Pertemuan 8

Lingkungan Teknologi

A. Lingkungan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor paling signifikan yang membentuk lingkungan bisnis modern. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi, melainkan juga sebagai penggerak utama transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Schumpeter (1942), inovasi teknologi adalah inti dari proses *creative destruction*, yaitu mekanisme di mana teknologi baru menggantikan teknologi lama, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan disrupsi terhadap pola bisnis yang sudah mapan. Oleh karena itu, memahami lingkungan teknologi menjadi keharusan bagi setiap pelaku bisnis dalam merumuskan strategi adaptif.

Lingkungan teknologi mencakup berbagai aspek, mulai dari kemajuan dalam otomasi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), Internet of Things (*IoT*), hingga teknologi finansial (*fintech*) yang mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnisnya cenderung memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang masih mengandalkan metode konvensional. Sebagai contoh, adopsi teknologi digital dalam e-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terikat pada batasan geografis (Laudon & Traver, 2021).

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan. Transformasi digital sering kali menimbulkan *digital divide*, yaitu kesenjangan akses dan kemampuan antara kelompok masyarakat atau negara yang mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal dan yang tertinggal dalam adaptasinya (Norris, 2001). Selain itu, isu keamanan siber menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Peningkatan transaksi digital memperbesar risiko pencurian data, serangan peretasan, dan kejahatan berbasis teknologi. Hal ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga pada penguatan infrastruktur keamanan.

Dalam konteks lingkungan bisnis, teknologi memiliki dampak multidimensi. Pertama, teknologi meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses produksi dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Kedua, teknologi membuka peluang inovasi produk dan jasa baru, seperti layanan berbasis aplikasi, transportasi daring, maupun sistem pembayaran digital. Ketiga, teknologi berperan dalam membentuk perilaku konsumen. Generasi muda yang lahir dalam era digital lebih cenderung memilih produk dan layanan yang cepat, praktis, serta terintegrasi dengan teknologi mobile.

Di sisi lain, teknologi juga mengubah lanskap kompetisi global. Negara-negara dengan kemampuan inovasi tinggi, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan, mampu mendominasi pasar internasional melalui penguasaan teknologi digital dan industri berbasis pengetahuan. Hal ini menempatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada posisi yang harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal dalam arus transformasi global. Program *Making Indonesia 4.0* yang diluncurkan pemerintah pada 2018 merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat daya saing industri melalui adopsi teknologi digital, termasuk otomatisasi, AI, dan IoT (Kementerian Perindustrian RI, 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan teknologi merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh mendalam terhadap bisnis. Perusahaan dituntut untuk senantiasa berinovasi, mengelola risiko digital, serta memastikan bahwa teknologi yang diadopsi selaras dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Hanya dengan demikian, perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam ekosistem bisnis global yang semakin terintegrasi dengan teknologi.

B. Inovasi Teknologi pada Masa Pra-Modern

Sejarah perkembangan teknologi menunjukkan bahwa inovasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak masa pra-modern. Pada masa ini, teknologi berfungsi terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, tempat tinggal, dan perlindungan diri. Penemuan alat-alat batu, teknik bercocok tanam, hingga kemampuan membuat peralatan dari logam menjadi tonggak penting dalam perjalanan peradaban. Menurut Mokyr (1990), inovasi pra-modern ini merupakan fondasi awal bagi terciptanya sistem ekonomi dan sosial yang lebih kompleks. Meski sederhana, teknologi

pra-modern memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan memungkinkan terjadinya spesialisasi kerja.

Perkembangan teknologi pra-modern juga erat kaitannya dengan kebudayaan dan lingkungan. Misalnya, masyarakat agraris mengembangkan irigasi untuk mendukung pertanian, sementara masyarakat pesisir menciptakan teknologi perahu untuk perdagangan dan transportasi. Hal ini menegaskan bahwa teknologi sejak awal bukanlah fenomena netral, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan kondisi geografis (Basalla, 1988).

C. Revolusi Industri dan Perkembangan Teknologi Modern

Revolusi Industri yang dimulai pada abad ke-18 di Inggris menandai titik balik dalam sejarah perkembangan teknologi. Penemuan mesin uap oleh James Watt dan penerapannya dalam bidang manufaktur, transportasi, serta energi mendorong percepatan industrialisasi dan urbanisasi. Teknologi modern yang lahir dari revolusi ini memungkinkan produksi massal dengan efisiensi tinggi, sehingga mengubah struktur ekonomi global secara mendasar (Landes, 1969).

Revolusi Industri juga memperkenalkan teknologi mekanisasi, kimia, dan komunikasi, yang pada gilirannya memperluas pasar dan meningkatkan standar hidup. Namun, perkembangan ini tidak hanya membawa dampak positif. Eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan ketimpangan sosial menjadi masalah serius yang muncul seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat (Pomeranz, 2000). Oleh karena itu, periode ini menunjukkan ambivalensi teknologi: sebagai motor kemajuan sekaligus sumber tantangan baru.

D. Era Digital dan Revolusi Teknologi Informasi

Memasuki akhir abad ke-20, dunia memasuki era digital yang ditandai dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penemuan komputer, internet, dan perangkat mobile mengubah secara radikal cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Menurut Castells (1996), era digital melahirkan apa yang disebut sebagai *network society*, di mana informasi menjadi sumber utama kekuasaan dan produktivitas.

Revolusi teknologi informasi tidak hanya mendorong efisiensi dalam dunia bisnis, tetapi juga menciptakan model bisnis baru berbasis

platform digital. E-commerce, fintech, dan transportasi daring merupakan contoh nyata bagaimana teknologi digital merevolusi interaksi pasar. Di sisi lain, muncul pula tantangan berupa kesenjangan digital (*digital divide*), isu privasi data, dan ketergantungan pada teknologi yang semakin tinggi (Norris, 2001).

Era digital juga menandai lahirnya *Industri 4.0*, di mana otomasi, kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data analytics menjadi pilar utama transformasi industri global. Hal ini membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, tetapi sekaligus menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan keterampilan baru yang lebih kompleks (Schwab, 2016).

E. Studi Kasus: Lingkungan Teknologi terhadap Lingkungan Bisnis

Perkembangan teknologi digital di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi lingkungan bisnis, khususnya dalam sektor jasa dan perdagangan. Salah satu contoh nyata adalah munculnya ekosistem ekonomi digital yang didorong oleh perusahaan berbasis teknologi seperti Gojek dan Tokopedia. Gojek, yang awalnya hanya berfokus pada layanan transportasi berbasis aplikasi, berhasil berevolusi menjadi *super-app* dengan layanan yang mencakup pembayaran digital, logistik, hingga layanan gaya hidup. Sementara itu, Tokopedia hadir sebagai platform e-commerce yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap percepatan inklusi digital dan perluasan akses pasar.

Kehadiran teknologi ini memberikan sejumlah kelebihan bagi dunia bisnis. Pertama, efisiensi operasional meningkat karena teknologi memungkinkan otomatisasi proses transaksi dan distribusi. Kedua, perluasan pasar menjadi lebih mudah karena perusahaan dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Ketiga, inovasi teknologi membuka peluang terciptanya model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan konsumen modern (Schwab, 2016).

Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi. Persaingan bisnis menjadi semakin ketat karena hambatan masuk pasar menurun, sehingga perusahaan tradisional sering kali kesulitan bersaing dengan pemain digital. Selain itu, isu perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius (Norris,

2001). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital membawa peluang besar, pengelolaan risiko dan kebijakan pendukung tetap diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Kasus perkembangan bisnis digital di Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan teknologi bukan hanya sekadar faktor eksternal, melainkan katalis utama dalam membentuk strategi bisnis dan pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi akan lebih unggul dalam menghadapi dinamika persaingan global.

F. Tugas

1. Jelaskan definisi lingkungan teknologi dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!
2. Jelaskan tentang inovasi teknologi pada masa pra-modern beserta contohnya!
3. Jelaskan tentang revolusi industri dan perkembangan teknologi modern di Indonesia!
4. Jelaskan tentang era digital dan revolusi teknologi informasi serta dampaknya terhadap perkembangan bisnis. Dan berikan contoh kasus di Indonesia!

Pertemuan 9

Lingkungan Alami

A. Lingkungan Alami

Lingkungan alami merupakan salah satu faktor fundamental yang membentuk dinamika aktivitas bisnis. Sumber daya alam, iklim, topografi, dan keanekaragaman hayati tidak hanya berfungsi sebagai penyedia input produksi, tetapi juga menjadi determinan utama dalam keberlanjutan bisnis dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumber daya alam yang rasional dan berorientasi jangka panjang (Daly & Farley, 2011). Oleh karena itu, perusahaan dan pembuat kebijakan dituntut untuk tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan.

Salah satu aspek penting dari lingkungan alami adalah ketersediaan sumber daya alam. Industri manufaktur, energi, dan pertanian sangat bergantung pada akses terhadap bahan baku dan energi. Namun, eksploitasi berlebihan dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti degradasi lahan, polusi, dan perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan pandangan Meadows et al. (2004) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa batas pada planet dengan sumber daya terbatas akan menciptakan risiko ekologi yang serius.

Selain itu, perubahan iklim global telah menjadi isu yang sangat memengaruhi lingkungan bisnis. Perubahan pola cuaca, kenaikan suhu bumi, serta bencana alam yang lebih sering terjadi menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok global. Misalnya, sektor pertanian menghadapi penurunan produktivitas akibat perubahan musim tanam, sementara sektor logistik dan infrastruktur terancam oleh risiko banjir maupun kenaikan permukaan laut (IPCC, 2021). Dengan demikian, adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi strategi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing. Lebih jauh, tuntutan konsumen terhadap praktik bisnis berkelanjutan semakin meningkat. Masyarakat global kini lebih kritis terhadap dampak lingkungan dari produk dan jasa yang mereka konsumsi. Fenomena ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi prinsip *environmental, social, and*

governance (ESG) serta strategi bisnis hijau (*green business strategies*), seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang material, dan pengurangan emisi karbon (Porter & Kramer, 2011). Perusahaan yang mampu merespons tren ini tidak hanya memperoleh legitimasi sosial, tetapi juga keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Dengan demikian, lingkungan alami tidak boleh dipandang sekadar sebagai faktor eksternal, melainkan sebagai elemen integral dalam perumusan strategi bisnis. Perusahaan yang mengabaikan faktor lingkungan berisiko kehilangan daya saing dan menghadapi tekanan regulasi maupun sosial. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam model bisnisnya akan lebih siap menghadapi tantangan global dan menciptakan nilai yang berkelanjutan.

B. Pencemaran Lingkungan: Dampak Polusi Terhadap Ekosistem

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem global. Polusi, baik berupa udara, air, maupun tanah, merupakan hasil dari aktivitas manusia yang berlebihan dan tidak terkendali, khususnya dari sektor industri, transportasi, serta urbanisasi. Polusi udara yang diakibatkan oleh emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida telah terbukti meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akumulasi gas-gas tersebut memperparah efek rumah kaca, memicu pemanasan global, serta meningkatkan frekuensi terjadinya bencana iklim ekstrem (IPCC, 2021).

Selain udara, polusi air juga menjadi perhatian utama, terutama akibat limbah industri dan pertanian yang mencemari sungai, danau, serta laut. Kandungan zat beracun, seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia sintetis, tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik, tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan (WHO, 2018). Sementara itu, polusi tanah akibat penggunaan bahan kimia berlebih dalam pertanian menurunkan kesuburan lahan, mengurangi keanekaragaman mikroorganisme, dan dalam jangka panjang berpotensi mengurangi produktivitas pangan. Dengan demikian, pencemaran lingkungan menciptakan lingkaran masalah yang saling berkaitan antara degradasi ekologi, penurunan kualitas hidup masyarakat, dan kerugian ekonomi yang signifikan.

C. Kehilangan Habitat: Deforestasi dan Perubahan Penggunaan Lahan

Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem global maupun nasional. Aktivitas manusia dalam bentuk ekspansi pertanian, perkebunan monokultur, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur telah mengubah bentang alam secara drastis. Data FAO (2020) menunjukkan bahwa sekitar 10 juta hektare hutan hilang setiap tahunnya, dengan wilayah tropis menjadi daerah yang paling terdampak. Indonesia, misalnya, mengalami deforestasi besar-besaran akibat pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi kayu, yang berdampak pada hilangnya habitat alami bagi spesies endemik seperti orangutan dan harimau sumatera.

Dampak ekologis dari deforestasi meliputi penurunan keanekaragaman hayati, terganggunya siklus hidrologi, dan berkurangnya kapasitas hutan sebagai penyerap karbon. Kehilangan tutupan hutan tropis juga memperparah laju perubahan iklim karena karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah besar. Dari sisi sosial-ekonomi, deforestasi menyebabkan konflik lahan, mengancam mata pencaharian masyarakat adat, dan mengurangi potensi ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh dari jasa ekosistem seperti pariwisata berbasis alam dan farmakologi. Dengan demikian, deforestasi bukan hanya persoalan ekologi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sosial dan ekonomi.

D. Spesies Invasif dan Gangguan Ekologis Lainnya

Selain pencemaran dan deforestasi, keberadaan spesies invasif juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekosistem alami. Spesies invasif adalah organisme yang masuk ke suatu ekosistem di luar habitat asalnya, kemudian berkembang biak secara tidak terkendali, dan mendominasi lingkungan baru tersebut. Dominasi spesies invasif dapat mengganggu keseimbangan ekologis karena spesies asli sering kali kalah bersaing dalam mendapatkan sumber daya, sehingga menyebabkan penurunan populasi atau bahkan kepunahan spesies lokal (Lowe et al., 2000).

Spesies invasif sering kali diperparah oleh perubahan iklim dan globalisasi perdagangan. Perubahan suhu dan pola curah hujan mempermudah penyebaran organisme asing ke wilayah baru, sementara intensifikasi perdagangan global meningkatkan risiko introduksi spesies

non-lokal melalui jalur logistik. Oleh karena itu, spesies invasif menjadi tantangan multidimensi yang menuntut regulasi ketat, penelitian ilmiah, serta kesadaran publik yang lebih tinggi.

E. Peran Lingkungan Alami dalam Lingkungan Bisnis

Lingkungan alami memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan dinamika dan keberlanjutan dunia bisnis. Sebagai sumber daya utama, lingkungan menyediakan bahan baku, energi, dan ekosistem pendukung yang menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi. Misalnya, sektor pertanian sangat bergantung pada kesuburan tanah, ketersediaan air, dan iklim yang stabil, sementara sektor manufaktur dan energi memerlukan pasokan mineral, bahan bakar fosil, serta energi terbarukan yang bersumber dari alam (Tietenberg & Lewis, 2018). Dengan demikian, kualitas dan ketersediaan sumber daya alam secara langsung memengaruhi kapasitas produksi dan daya saing bisnis.

Selain sebagai penyedia sumber daya, lingkungan alami juga berperan sebagai penyerap limbah dan polusi yang dihasilkan dari aktivitas industri. Namun, kemampuan daya dukung lingkungan memiliki batas. Ketika kegiatan bisnis tidak memperhatikan keberlanjutan, maka timbul masalah lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, deforestasi, dan perubahan iklim yang justru akan berdampak balik terhadap dunia usaha. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi lingkungan menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian alam. Lingkungan alami berperan sebagai faktor risiko sekaligus peluang dalam strategi bisnis. Risiko muncul ketika terjadi bencana alam, degradasi lingkungan, atau perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasok, menaikkan biaya produksi, serta menurunkan produktivitas. Sebaliknya, peluang tercipta melalui inovasi bisnis berbasis lingkungan, seperti energi terbarukan, teknologi hijau, serta produk ramah lingkungan yang kini semakin diminati konsumen global. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam model bisnisnya akan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang.

Dengan demikian, lingkungan alami tidak hanya menjadi latar belakang aktivitas ekonomi, melainkan merupakan variabel strategis yang menentukan arah, keberlanjutan, dan daya saing bisnis. Mengabaikan faktor lingkungan berarti mengabaikan fondasi utama dari sistem ekonomi itu sendiri.

F. Studi Kasus: Dampak Lingkungan Alami terhadap Lingkungan Bisnis

Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia, dengan komoditas utama kopi arabika dan robusta yang menjadi penopang penting ekspor pertanian nasional. Namun, keberlangsungan industri kopi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alami, khususnya iklim, kesuburan tanah, dan ketersediaan air. Perubahan iklim global dalam bentuk peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan, telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap produktivitas kopi di berbagai wilayah.

Penelitian International Coffee Organization (ICO, 2019) menunjukkan bahwa kenaikan suhu rata-rata sebesar 2°C dapat mengurangi area lahan yang sesuai untuk budidaya kopi arabika hingga 50% pada tahun 2050. Dampak ini sudah mulai dirasakan di beberapa daerah penghasil kopi di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi, di mana hasil panen menurun akibat perubahan musim hujan yang tidak menentu. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri kopi nasional yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, tantangan ini juga mendorong munculnya peluang baru. Beberapa perusahaan kopi mulai mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan varietas tahan iklim, sistem agroforestri, serta sertifikasi kopi hijau yang ramah lingkungan. Upaya ini tidak hanya membantu menjaga produktivitas, tetapi juga meningkatkan daya saing kopi Indonesia di pasar global yang semakin menuntut produk berkelanjutan (World Bank, 2021).

Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa lingkungan alami, dalam hal ini perubahan iklim, memiliki peran yang ambivalen terhadap bisnis: sebagai sumber risiko yang dapat mengganggu stabilitas usaha, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan transformasi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan.

G. Tugas

1. Jelaskan definisi lingkungan alami (natural) dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!
2. Jelaskan dampak polusi terhadap ekosistem!
3. Jelaskan tentang deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, dan berikan contoh kasus yang ada di Indonesia!
4. Jelaskan dampak lingkungan alami (natural) terhadap perkembangan bisnis!

Pertemuan 10

Lingkungan Pemerintahan

A. Lingkungan Pemerintahan

Lingkungan pemerintahan merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat menentukan arah, stabilitas, dan keberlanjutan dunia bisnis. Pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur (regulator) dan penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai pencipta iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan, regulasi, serta penegakan hukum. Dalam konteks ini, keberhasilan dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola pemerintahan.

Bisnis modern tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika pasar, melainkan juga oleh sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Faktor seperti stabilitas politik, transparansi regulasi, efisiensi birokrasi, serta konsistensi kebijakan ekonomi menjadi indikator penting yang menentukan tingkat kepercayaan investor dan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, memahami lingkungan pemerintahan merupakan kebutuhan strategis bagi para pelaku usaha agar dapat mengantisipasi risiko sekaligus memanfaatkan peluang yang tercipta.

Dalam literatur ekonomi politik, pemerintah dipandang memiliki peran ganda dalam perekonomian, yakni sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi dan sebagai pengendali distorsi pasar. Pemerintah bertugas menciptakan kerangka regulasi yang jelas, melindungi hak kepemilikan, menjaga stabilitas makroekonomi, serta mendorong inovasi melalui kebijakan industri dan teknologi (Stiglitz, 2000). Tanpa regulasi yang memadai, pasar berpotensi mengalami kegagalan seperti monopoli, eksternalitas negatif, dan ketidakadilan distribusi sumber daya. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai aktor fiskal melalui kebijakan anggaran negara, serta sebagai otoritas moneter melalui koordinasi dengan bank sentral. Peran ini memastikan tersedianya infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta keamanan, yang semuanya menjadi prasyarat bagi perkembangan bisnis yang sehat.

B. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah merupakan suatu sistem di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah. Dalam konteks bisnis, desentralisasi membuka peluang terciptanya iklim usaha yang lebih kompetitif antar daerah, sebab pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menarik investasi melalui kebijakan lokal, penyediaan infrastruktur, serta kemudahan perizinan (Faguet, 2014).

Namun demikian, desentralisasi juga menghadirkan tantangan berupa ketimpangan antar daerah, lemahnya kapasitas institusional di beberapa wilayah, serta potensi tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting agar desentralisasi benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

C. Peran dan Fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Kepala negara adalah pejabat tertinggi yang mewakili negara dalam urusan domestik maupun internasional. Perannya mencakup ratifikasi undang-undang, fungsi simbolis kenegaraan, pemberian gelar kehormatan, pengambilan keputusan penting dalam situasi krisis nasional, hingga penguasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Selain itu, kepala negara juga memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan duta dan konsul serta menerima perwakilan diplomatik dari negara lain. Di tingkat daerah, kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, atau wali kota memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah berperan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pusat di daerah, menyusun serta mengajukan rancangan peraturan daerah terkait perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta mengambil langkah darurat dalam situasi mendesak. Dengan demikian, baik kepala negara maupun kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas masyarakat.

D. Peran Parlemen dalam Proses Pembuatan Undang-Undang

Parlemen merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi utama dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, serta fungsi anggaran. Dalam konteks bisnis, peran parlemen sangat penting karena undang-undang yang dihasilkan menentukan regulasi yang mengikat pelaku usaha. Parlemen juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial dijalankan sesuai prinsip demokrasi dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, parlemen berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif sehingga tercipta mekanisme check and balance yang sehat dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan parlemen yang kuat, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan legitimasi regulasi dan memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha (Lijphart, 2012).

1. Peran Parlemen
 - a. Membentuk undang-undang.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
 - c. Menyetujui dan mengawasi anggaran negara.
 - d. Mewakili aspirasi rakyat dalam proses kebijakan.
 - e. Mendukung kebijakan yang baik dan mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat.
 - f. Memilih atau menyetujui pengangkatan pejabat tinggi negara.
 - g. Menjaga keseimbangan kekuasaan untuk stabilitas demokrasi.
2. Proses Pembuatan Undang-Undang
 - a. Perencanaan: Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
 - b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU):
 - Diusulkan oleh Presiden, DPR, atau DPD (terbatas pada bidang tertentu).
 - Disusun bersama tenaga ahli atau akademisi.
 - c. Pembahasan:
 - Tahap pertama: dibahas di komisi/pansus DPR.
 - Tahap kedua: disempurnakan dengan masukan publik atau antar-fraksi.

- d. Persetujuan: RUU dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui.
- e. Pengesahan: Presiden menandatangani dalam waktu 30 hari. Jika tidak, tetap sah sebagai undang-undang.
- f. Pengundangan: Disahkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum dan HAM.

E. Peran dan Fungsi Sistem Peradilan

Sistem peradilan merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang menjamin tegaknya keadilan, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam ranah bisnis, sistem peradilan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa, menegakkan kontrak, serta memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Keberadaan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik menjadi syarat mutlak bagi terciptanya iklim bisnis yang sehat.

Peradilan yang lemah atau koruptif justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya transaksi, serta melemahkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, penguatan lembaga peradilan melalui reformasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (La Porta et al., 1998).

1. Peran Sistem Peradilan
 - a. Menegakkan keadilan bagi setiap individu.
 - b. Menjamin penerapan hukum secara konsisten.
 - c. Melindungi hak dan kebebasan warga negara.
 - d. Mencegah dan menyelesaikan konflik.
 - e. Memelihara ketertiban sosial.
2. Fungsi Sistem Peradilan
 - a. Fungsi Yudisial: Memutuskan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan konstitusi.
 - b. Fungsi Pengawasan: Mengawasi tindakan pemerintah dan lembaga agar sesuai hukum dan konstitusi.
 - c. Fungsi Interpretasi Hukum: Memberikan penafsiran hukum dalam kasus tertentu.
 - d. Fungsi Perlindungan: Memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah atau dirugikan.
 - e. Fungsi Edukasi: Memberikan pelajaran hukum kepada masyarakat melalui putusan.

- f. Fungsi Rekonsiliasi: Membantu menyelesaikan sengketa secara damai.

F. Studi Kasus: Otonomi Daerah dan Iklim Investasi di Indonesia

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 menjadi tonggak penting dalam desentralisasi pemerintahan. Kebijakan ini memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek perizinan usaha dan pengelolaan investasi. Dari perspektif bisnis, desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, memperpendek rantai birokrasi, serta menghadirkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, implementasi otonomi daerah tidak lepas dari tantangan. Penelitian World Bank (2019) mencatat bahwa meskipun beberapa daerah berhasil memanfaatkan kewenangan otonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, masih banyak daerah lain yang menghadapi masalah berupa tumpang tindih regulasi, perbedaan kebijakan antar wilayah, serta praktik korupsi di tingkat lokal. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan (*high cost economy*) bagi pelaku usaha, khususnya investor asing yang membutuhkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Sebagai respons, pemerintah pusat meluncurkan kebijakan Online Single Submission (OSS) pada tahun 2018 untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi di tingkat daerah. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien, transparan, dan ramah investasi (Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Studi kasus ini memperlihatkan bahwa lingkungan pemerintahan memiliki pengaruh langsung terhadap dunia bisnis. Desentralisasi membuka peluang terciptanya iklim usaha yang kompetitif, namun juga berisiko menimbulkan fragmentasi regulasi jika tidak diiringi dengan koordinasi dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan publik, merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan.

G. Tugas

1. Jelaskan tentang lingkungan pemerintahan, otonomi daerah, dan desentralisasi!
2. Jelaskan peran dan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan!
3. Jelaskan peran parlemen dalam proses pembuatan undang-undang!
4. Jelaskan peran dan fungsi sistem peradilan!
5. Jelaskan dampak lingkungan pemerintahan terhadap perkembangan bisnis!

Pertemuan 11

Presentasi dan Diskusi Makalah Akhir

Bab ini dirancang sebagai tahap penutup dari rangkaian pembelajaran mata kuliah, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil kajian akademis yang telah mereka susun dalam bentuk makalah akhir. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi terhadap pemahaman konseptual mahasiswa mengenai materi yang telah dibahas, tetapi juga sebagai media pembelajaran aktif yang menekankan keterampilan komunikasi ilmiah, argumentasi kritis, serta kolaborasi akademik.

Presentasi makalah akhir memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan analisis mereka terhadap isu-isu yang relevan dengan lingkungan bisnis, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, teknologi, maupun lingkungan. Selain itu, kegiatan diskusi yang menyertainya mendorong mahasiswa untuk melibatkan diri dalam dialog akademis, mempertahankan argumen berdasarkan data dan teori, serta membuka diri terhadap kritik konstruktif dari rekan sejawat maupun dosen. Secara pedagogis, kegiatan ini juga memperkuat capaian pembelajaran berupa penguasaan teori, keterampilan analitis, serta integritas akademik. Dengan demikian, presentasi dan diskusi makalah akhir bukan sekadar sarana penilaian, melainkan juga wahana pembentukan kompetensi yang komprehensif, yang akan bermanfaat dalam pengembangan karier profesional maupun kontribusi intelektual mahasiswa di masa depan.

Pertemuan 12

Presentasi dan Diskusi Makalah Akhir

!

Bab ini disusun sebagai bagian penutup dari rangkaian pembelajaran, yang difokuskan pada presentasi penutup dan evaluasi akhir mahasiswa. Kegiatan ini menjadi forum bagi mahasiswa untuk menyampaikan refleksi komprehensif atas materi yang telah dipelajari, sekaligus untuk menunjukkan keterpaduan antara teori, analisis, dan aplikasi praktis dalam memahami lingkungan bisnis. Melalui presentasi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sintesis pemikiran mereka terkait isu-isu strategis yang berkembang dalam dunia bisnis global. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat memperdalam pemahaman bersama, mendorong pertukaran gagasan, serta meneguhkan pentingnya keterampilan analitis dan etika dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, evaluasi akhir yang dilaksanakan pada tahap ini tidak hanya berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pada aspek sikap dan partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan dalam bab ini berfungsi sebagai sarana evaluasi menyeluruh sekaligus sebagai momentum peralihan dari proses belajar di kelas menuju penerapan pengetahuan dalam konteks profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bappenas. (2018). *Proyeksi penduduk Indonesia 2015–2045*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://www.bappenas.go.id>
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change*. RAND Corporation.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Carson, R. (1962). *Silent spring*. Houghton Mifflin.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chang, H. J. (2003). *Globalisation, economic development and the role of the state*. Zed Books.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*. Brookings Institution Press.
- Dahl, R. A. (2000). *On democracy*. Yale University Press.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). *Macroeconomics* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Finer, S. E. (1997). *The history of government from the earliest times*. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Heywood, A. (2019). *Politics* (5th ed.). Macmillan International.

- Hill, H. (1996). *The Indonesian economy since 1966: Southeast Asia's emerging giant*. Cambridge University Press.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2018). *International economics: Theory and policy* (11th ed.). Pearson.
- Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Macroeconomics* (5th ed.). Worth Publishers.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries* (2nd ed.). Yale University Press.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. W. (1972). *The limits to growth*. Universe Books.
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets* (12th ed.). Pearson.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Ritzer, G. (2011). *Globalization: The essentials*. Wiley-Blackwell.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.

- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- UNIDO. (2019). *Industrial development report 2020: Industrializing in the digital age*. United Nations Industrial Development Organization. <https://www.unido.org/idr2020>
- United Nations. (2019). *World population prospects 2019*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://population.un.org/wpp>
- United Nations Development Programme. (2019). *Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today*. United Nations. <https://hdr.undp.org/>
- Williamson, J. G. (2013). *Demographic dividends revisited*. *Asian Development Review*, 30(2), 1–25.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020>
- World Bank. (2021). *The changing wealth of nations 2021: Managing assets for the future*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wealth-of-nations>
- World Bank. (2022). *Global economic prospects, January 2022: The global economy entering a pronounced slowdown*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

World Justice Project. (2021). *Rule of law index 2021*. World Justice Project. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>

LAMPIRAN

• Materi Pertemuan 1

GBE

Ekonomika Pembangunan dan Regional

PERTEMUAN KE 1

Dr. Ita Fionita, S.E., M.M

Kode MK : GBE
SM, SMA, SMK/MAK

OUTLINE

Ekonomika Pembangunan dan Regional :

1. Ekonomi Regional
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pusat pertumbuhan menurut ahli
4. Dasar-dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan.
5. Tempat Sentral Hierarki.
6. Karakteristik utama sebuah pusat pertumbuhan
7. Konsep dasar wilayah pertumbuhan

Kode MK : GBE

MENGAPA DAN APA ILMU EKONOMI REGIONAL?

Wilayah berbeda-beda potensi (SDA, SDM, SD Bustin, SD sosial)-nya, sehingga tidak bisa disamakan:

- Aktifitas ekonomi 'apa' yang akan dilakukan
- Bagaimana aktifitas ekonomi tsb dilakukan
- Untuk siapa dan bagaimana distribusi hasilnya
- Kapan aktifitas dilakukan

Bisa memberikan contoh-contohnya????

Ek. Regional mempertimbangkan perbedaan lokasi untuk menentukan aktifitas ekonomi?

Jadi, apa definisi Ilmu Ekonomi Regional? Kata kunci cabang ilmu "ekonomi", "lokasi"

Kode MK : MK

APA REGION

→ Region: suatu unit geografis dengan batas tertentu dimana bagian-bagiannya satu sama lain saling tergantung secara fungsional

→ Berdasarkan batas:
Wilayah, kawasan, daerah

Apa kira-kira definisi masing-masing?

→ Berdasarkan tipologinya:
Region Nodal, Homogen, Perencanaan, Administratif

Kode MK : MK

REGION NODAL

Region Nodal : Suatu unit geografis dimana ada bagian yang berfungsi sebagai 'inti' dan bagian lainnya berfungsi sebagai 'peringgannya'

→ Batas: tidak berimpitan dengan batas administratif politis!

- Wilayah Peringgannya: wilayah belakang = hinterland
- Wilayah peralihan = peri-feri
- Wilayah inti: pusat / kota

Kode MK : MK

Ekonomi Regional merupakan suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sebagainya dengan didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

Kode MK : MK

TUJUAN ILMU EK. REGIONAL

10 Apa saja tujuan pembangunan nasional/wilayah?

10 Tujuan Ilmu Ek. Regional = membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Regional

1. Kestabilan lingkungan hidup
2. Pemerataan pembangunan dalam wilayah
3. Pemanfaatan sektor unggulan
4. Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah
5. (silakan tambah lagi...)

→ Intinya: Mempercepat pembangunan ekonomi wilayah

→ Bisa memberi contoh 'bagaimana' Ek. Regional bisa mencapai tujuan-tujuan di atas??

Kode MK : MK

Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada unyuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

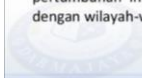
Kode MK : MK



**Teori Pusat Pertumbuhan
(Growth Pole Teori)**
Francis Perroux

Pembangunan atau Pertumbuhan yang terjadi di suatu tata ruang di pengaruhi oleh beberapa variabel.

2024 Kully MK - GSE
MK: MAA 103031 Revisi: 00



Pusat pertumbuhan Menurut Ahli :

Pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi atau memberikan imbas terhadap kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Melalui pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ini, diharapkan terjadi proses interaksi dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

2024 Kully MK - GSE
MK: MAA 103031 Revisi: 00

• Materi Pertemuan 2

GBE

**KEBIJAKAN MONETER
PERTEMUAN KE 2**

Dr. Ita Fionita, S.E.,M.M

Kode MK : GBE
MK : MMA 1930031

Revisi: 00

OUTLINE

Kebijakan Moneter

- Kebijakan moneter : 1. Rule Policy, 2. Discretion Policy.
- Model Kebijakan menurut Ahli
- Tujuan Kebijakan Moneter
- Instrumen Kebijakan Moneter
- Jenis Kebijakan Moneter

Kode MK : GBE
MK : MMA 1930031

Revisi: 00

Kebijakan moneter

seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur masalah makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran.

Kode MK :
MK :

Revisi: 00

Kebijakan moneter

Cara pelaksanaan melalui, penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank sentral yaitu **Bank Indonesia**

Kode MK :
MK :

Revisi: 00

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang menekankan pada sisi perubahan Jumlah Uang Beredar (JUB).

Suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, membutuhkan kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah kebijakan moneter.

Kode MK :
MK :

Revisi: 00

Rule Policy

Kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu untuk diberlakukan secara terus-menerus (dan tidak mengalami perubahan),



Kode MK :
MK :

Revisi: 00

Rule Policy

kebijakan yang berada di bawah teori moneter yang dikemukakan oleh Friedman. Dalam teori Kuantitas dikemukakan bahwa fluktuasi GNP disebabkan oleh adanya fluktuasi Supply Uang (JUB).

Kode MK :
MK :

Revisi: 00

Discretion Policy.

kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu, atau kebijakan yang senantiasa berubah tiap perodenya, disebut **Discretion Policy**.

Kode MK :
MK :

Revisi: 00

Mengatasi fluktuasi GNP ini maka diperlukan suatu tingkat pertumbuhan JUB yang stabil/tetap. Pengendalian JUB secara teratur dengan cara JUB tumbuh dengan suatu tingkat tertentu yang konstan ini berlaku dalam jangka panjang. Dengan **Fixed Growth Rate in The Money Supply**, maka kontraksi dan ekspansi ekonomi akan menjadi relatif stabil.

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

Discretion (Countercyclical)

Kebijakan yang dicetuskan oleh penasihat presiden Kennedy dan Johnson. Discretion ini menganut perubahan JUB yang sesuai dengan kebutuhan, karena JUB tergantung pada nilai variabel ekonomi yang lalu dan yang akan datang

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

Alasan fundamental dari *discretion* adalah gangguan perekonomian (GNP) yang utama itu berasal dari sektor riil. Karena '*range of swings*' dari output riil ini tidak menentu, maka tidak ada 'rule' yang absolute yang dapat mengatasi sepanjang periode yang lama. Untuk itu kebijakan discretionlah yang paling tepat. Hal lain yang mendasari discretion adalah kondisi sistem ekonomi yang sangat kompleks, sedangkan pengetahuan terbatas, sehingga terdapat konsekuensi terjadinya malfungsi dari Kebijakan Rule.

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

model dari Robert J. Barro (1983), lebih banyak menyoroti bagaimana perilaku pembuatan kebijakan tersebut mempertimbangkan reaksi dan ekspektasi dari masyarakat.

Bennett T. McCallum (1989), yang diharapkan dapat memperjelas perbedaan antara dua bentuk kebijakan moneter tersebut.

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

Model Pengangguran Inflasi Barro dan Gordon (1983)

memformulasikan model untuk melihat perilaku pemerintah dalam membuat kebijakan moneter melalui pendekatan pengangguran-inflasi.

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

Di dalam model terdapat tiga hal yang utama yaitu:

1. Tingkat Pengangguran merupakan proksi bagi aktivitas ekonomi riil.
2. Pembuat kebijakan (yang selanjutnya dalam makalah ini disebut sebagai pemerintah) dan masyarakat bertindak rasional.
3. Tujuan pemerintah mencerminkan preferensi masyarakat.

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

Model Pertumbuhan Uang

Model pengangguran-inflasi lebih menekankan pada mekanisme terjadinya/terbentuknya kebijakan rule atau discretion. Untuk lebih memperjelas perbedaan kedua kebijakan tersebut, maka model Pertumbuhan Uang dari *McCallum (1989)* berikut merupakan bentuk yang lebih sederhana untuk mengamati perbedaan efektivitas antara rule dan discretion.

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

Rules Versus Discretion

Dua model di atas, kita dapat melihat perbandingan kelemahan/keunggulan antara rule dan discretion. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bila pemerintah menggunakan rule, maka fungsi reaksi masyarakat yang dipertimbangkan hanya satu saja yaitu $h(I_t - 1)$. Kondisi ini membuat rule tampak seperti kendali yang tak berujung bagi pemerintah. Dari hal ini, maka rule akan layak hanya jika pemerintah tidak cakap dan tidak dipercaya yaitu dalam bentuk penetapan tujuan yang tidak tepat.
2. Hal penting dari rule adalah kapasitasnya untuk membatasi kebijakan yang akan dibuat pada periode yang akan datang. Dalam kasus pengangguran-inflasi, hasil dari rule akan bersifat suboptimal, bila kita mengabaikan biaya pemberlakuan kebijakan. Solusi $\pi_t = 0$ dan $U_t = U_t$ dapat dicapai melalui mekanisme (dengan biaya yang rendah) yang membatasi tindakan pemerintah yang akan datang terhadap inflasi.

2024 Kode MK : MK. Revisi: 00

• Materi Pertemuan 3

GBE

**KEBIJAKAN FISKAL
PERTEMUAN KE 3**

Dr. Ita Fionita, S.E., M.M

Kode MK : GBE
MK : MMA 1903031

Kebijakan Fiskal dan Sejarahnya

Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk memengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan. Ini digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, dan memengaruhi perekonomian menggunakan jumlah uang beredar dan suku bunga.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Idealnya, ekonomi harus tumbuh antara 2% -3% per tahun, pengangguran akan berada pada tingkat alami sebesar 4,7% -5,8%, dan inflasi akan berada pada tingkat target 2%. Siklus bisnis akan berada dalam fase ekspansi.

Kode MK :
MK

- Saat era depresi besar, sebagian besar **kebijakan fiskal mengikuti teori ekonomi laissez-faire**. Filosofi percaya bahwa mereka tidak boleh mengganggu kapitalisme dalam ekonomi pasar bebas, tetapi **Franklin D. Roosevelt (FDR)** mengubah itu dengan menjangkau Kesepakatan Baru untuk mengakhiri Depresi.
- Dia mengikuti **teori ekonomi Keynesianisme**, yang mengatakan peran kebijakan pemerintah dapat mengakhiri depresi dengan merangsang permintaan konsumen. Dia memunculkan **kebijakan fiskal ekspansif** dengan pengeluaran untuk membangun jalan, jembatan, dan bendungan. Pemerintah federal merekrut jutaan, membuat orang kembali bekerja, dan mereka membebankan pengalihan mereka untuk barang pribadi, mendorong permintaan.
- **FDR mengakhiri Depresi pada tahun 1934 ketika ekonomi tumbuh 10,8%**. Kemudian meningkat sebesar 8,9% pada tahun 1935 dan 12,9% pada tahun 1936. Namun pada tahun 1937, **FDR khawatir tentang menyeimbangkan anggaran**. Dia menggunakan **kebijakan fiskal kontraktif**, dan memangkas pengeluaran pemerintah, dan pada tahun 1938, ekonomi menurun sebesar 3,3%.
- Pada tahun 1939, **FDR memperluas kebijakan fiskal ekspansif** untuk mempersiapkan keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia II. Dia menandatangani 30 kali lebih banyak pada 1943 untuk perang daripada pada 1933 untuk New Deal. **Tingkat agresif kebijakan fiskal ekspansif mengakhiri masa depresi untuk selamanya.**

Kode MK :
MK

3. Kebijakan Pembiayaan Defisit

- Jika pengeluaran Pemerintah lebih dari pendapatannya, maka pemerintah, harus mengumpulkan jumlah ini. Jumlah ini defisit dan dapat dipenuhi dengan mengeluarkan mata uang baru oleh bank sentral negara. Tapi, itu akan mengurangi daya beli mata uang. Semakin banyak mata uang baru akan meningkatkan inflasi dan setelah nilai inflasi mata uang akan menurun. Jadi, pembiayaan defisit adalah masalah yang sangat serius di depan pemerintah. Pemerintah harus menggunakannya, jika tidak ada sumber pemerintah lain, penghasilan.

4. Kebijakan Utang Publik

- Jika pemerintah berpendapat bahwa pembiayaan defisit tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik atau jika pemerintah tidak menggunakan pembiayaan defisit, maka pemerintah dapat mengambil pinjaman dari bank dunia, atau mengambil pinjaman dari publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi.

OUTLINE

Kode MK : GBE
MK : MMA 1903031

Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Fiskal dan sejarahnya
2. Instrumen Kebijakan Fiskal
3. Tujuan Kebijakan Fiskal
4. Jenis Kebijakan Fiskal

Kode MK :
MK

Sejarah kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal tumbuh dari ide-ide **John Maynard Keynes** – seorang ekonom Inggris pada akhir 1800-an hingga 1900-an – yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menggunakan pengaruhnya terhadap ekonomi untuk menyeimbangkan fase ekspansi dan kontraksi dari siklus bisnis.

Keynes menegaskan bahwa, ketika ada aktivitas rendah dalam perekonomian, pemerintah harus memiliki defisit anggaran. Kebalikannya, selama masa aktivitas tinggi dalam perekonomian, anggaran harus surplus. Pada dasarnya, **Keynes** meletakkan dasar bagi kebijakan fiskal dengan menyatakan bahwa pemerintah dapat memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor dengan memperluas atau mengontrol untuk menangkul waktu aktivitas rendah atau tinggi.

Kode MK :
MK

Kebijakan fiskal 2

Instrumen Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Perpajakan

- Ini adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat memengaruhi perubahan pendapatan, konsumsi, dan investasi. Kebijakan perpajakan berkaitan dengan amandemen baru dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung.

2. Kebijakan Pengeluaran Pemerintah

- Ada sejumlah besar pengeluaran publik seperti pembukaan sekolah pemerintah, perguruan tinggi dan universitas, pembuatan jembatan, jalan, dan rel kereta api baru. Untuk proyek-proyek di atas, pemerintah telah membayar jumlah besar untuk membeli dan membayar upah dan gaji, namun, semua pengeluaran ini dibayarkan setelah disetujui pemerintah.

Kode MK :
MK

5. Budgetting

- Kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgetting. Oleh karena itu, kebijakan ini juga disebut kebijakan anggaran. Istilah anggaran berasal dari kata Prancis "Bougette" yang berarti tas kulit atau dompet yang digunakan untuk membawa surat kabar keuangan.
- Anggaran suatu negara adalah instrumen yang berguna untuk menilai fluktuasi ekonomi. Prinsip-prinsip anggaran yang berbeda telah dirumuskan oleh para ekonom, yang dikenal sebagai anggaran tahunan, anggaran berimbang siklus dan anggaran kompensasi terkelola penuh.

• Materi Pertemuan 4

GBE

Kebijakan Industri dan Sektor

PERTEMUAN KE 4
Dr. Ita Flonita, S.E., M.M

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

OUTLINE

**Kebijakan Industri dan Sektor :
Sustansi Kebijakan Industri dan Sektor**

Konsep Filosofi Pendidikan 4.0

filosofi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan Industri 4.0 perlu disusun secara komprehensif, dalam rangka memenuhi tuntutan kemampuan dasar dari perubahan tersebut. Sehingga, sistem pendidikan dapat menghasilkan generasi penerus yang produktif (Bolat dan Bas, 2018)

2024

Revisi: 00

RPJPN: Arah Pembangunan Ekonomi - 2025
Transformasi Perekonomian

- Arah utamanya adalah mengembangkan perekonomian domestik yang kuat, berorientasi dan berdaya saing global
- Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian berkeunggulan kompetitif.
- Dengan prinsip dasar:
 - Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi dan penguasaan iptek.
 - Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktek terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan.
 - Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

2024

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

Revisi: 00

INDUSTRI: ARAH KEBIJAKAN

Akselerasi Pertumbuhan Industri

PENGEMBANGAN PERULAIHAN INDUSTRI

• Fokusnya di luar Pulau Jawa (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (zona zona yang berada dalam koridor ekonomi), (2) Kawasan Perumbuhan Industri, (3) Kawasan Industri, (4) Zona IRI (5) Kawasan Ekonomi Khusus, (6) Kawasan Berikat / Export Processing Zone (EPZ), (7) Kawasan Perdagangan Bebas (KPB).

PENINGKATAN POPULASI DAN PEMBARUAN PERSEBARAN INDUSTRI

• Efisiensi untuk meningkatkan produktivitas pabrik kelas sedang & ibu usaha industri berkelas besar dan sedang secara 100% transfer di luar zona, serta pertumbuhan industri baru sektor 20-ibu usaha kecil.

PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS

• Meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi (1) meningkatkan efisiensi teknis, (2) mengembangkan industri dengan kemitraan teknologi yang lebih tinggi, (3) Mengembangkan kemampuan inovasi menggunakan prinsip baru (New Product Development, NPD), dan (4) Peningkatan Pasar melalui inovasi dan strategi.

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

2024

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

Faktor Kebijakan Industri dan sektoral

Faktor Kebijakan Industri & Sektoral

Petuang Bisnis

- Menerapkan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Perindustrian yang dapat membantu PT, Mada, Teknologi (Mandiri) untuk melihat dan menganalisis perubahan-perubahan yang bergerak dalam sektor industri prioritas.

Ancaman Bisnis

- Melakukan penyesuaian jasa pada perusahaan di sektor tersebut.

Implikasi Bisnis

- Menilai investasi sektor Property Technology ke dalam 2 prioritas, sehingga perusahaan harus berpenan akuisisi aset industri yang telah menjadi prioritas.
- Mengurangi beban daftar-daftar perusahaan yang bergerak di lima industri prioritas dan melakukan analisis peluang untuk melakukan penyesuaian jasa serta mempekerjakan peran-geri kompetitor agar tidak kalah dalam bersaing.

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

2024

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

Faktor Kebijakan Industri dan sektoral

Faktor Kebijakan Industri & Sektoral

Kebijakan untuk membangun sektor digital mulai menjadi prioritas nasional dengan agenda Making Indonesia 4.0

10 STRATEGI TRANSFORMASI NASIONAL UNTUK MAKINDA INDONESIA 4.0

10 STRATEGI TRANSFORMASI NASIONAL UNTUK MAKINDA INDONESIA 4.0

Sumber : Kementerian Perindustrian

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

2024

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

Faktor Kebijakan Industri dan sektoral

Faktor Kebijakan Industri & Sektoral

Isu utama

- Revolusi industri 4.0 menjadi perhatian utama Indonesia, & hanya berfokus pada lima sektor utama untuk pemangas aset dan teknologi, ke, yaitu manufaktur dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik.

KESIAPAN INDONESIA HADAPI ERA INDUSTRI 4.0

Sumber : Bina Indonesia

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

2024

Kode MK : GBE
MK : MMA 1500031

Kebijakan industri

Kebijakan industri dari suatu negara usaha strategis secara resmi untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan dari sebagian atau seluruh sektor perindustrian dan sektor-sektor lainnya dari perekonomian. Pemerintah memiliki tujuan dalam meningkatkan daya saing dan kemampuan dari perusahaan-perusahaan domestik dan memajukan transformasi struktural.

Infrastruktur suatu negara (transportasi, telekomunikasi dan industri energi) adalah bagian penting dari sektor manufaktur yang seringkali memiliki peran kunci dalam kebijakan industri.

Kebijakan industri adalah sektor yang spesifik, tidak seperti kebijakan makro ekonomi yang sifatnya lebih luas. Contoh dari kebijakan makro ekonomi, yang sifatnya horizontal, termasuk kepada kebijakan ekonomi secara luas, adalah mengetatkan kredit dan memajaki keuntungan modal, sementara contoh dari kebijakan industri, yang sifatnya vertikal, kebijakan sektor yang spesifik, termasuk memproteksi tekstil dari impor dan mensubsidi industri ekspor.

2024

Kode MK : GBE
MK : Modul 10/2023

Revisi: 00

Teori Sektoral

Geografi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang planet Bumi. Geografi mempelajari tentang banyak hal, tidak hanya tentang bentuk permukaan Bumi atau kerak bumi saja, namun juga mengenai peta dan lain sebagainya. Sebenarnya geografi ini adalah cabang ilmu yang lumayan besar sehingga mesti dibagi-bagi ke dalam cabang ilmu yang lebih spesifik lagi. Setidaknya kita mengenal ada belasan cabang ilmu geografi. Selain itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari ilmu geografi. Diantaranya ada berbagai teori yang terdapat di dalam ilmu geografi. Salah satu teori yang terdapat di dalam ilmu geografi adalah teori menenai tata ruang suatu tempat atau tata letak suatu daerah.

2024

Kode MK :
MG

Revisi: 00

• Materi Pertemuan 5

GBE

Lingkungan Demografi

PERTEMUAN KE 5

Dr. Ita Fionita, S.E.,M.M

Kode MK : GBE
MK : IMAA 193051

Filosofi Lingkungan

Filosofi mengenai lingkungan tidak terlepas dari filsafat tradisional yang membedakan teori konsekuensial (teleologis) seperti utilitarianisme dan teori non-konsekuensial (deontologis) yang berbasis pada Filosofi hak.

Filosofi lingkungan itu sendiri terdiri dari: antroposentris (berpusat pada manusia) dan ekosentris (berpusat pada alam).



Pendapat Ahli

Gery et al (1996) mengklasifikasikan tentang cara dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam membayangkan hubungan organisasi dan masyarakat, yaitu:

1. **Kapitalis Murni**: pandangan dominan dalam akuntansi dan keuangan salah satunya adalah tanggung jawab korporasi untuk membuat uang bagi para pemegang saham.
2. **Bijaksana**: orang-orang yang memiliki pandangan jangka panjang yang menyadari bahwa kesejahteraan ekonomi dan stabilitas hanya dapat dicapai melalui proses tanggung jawab sosial.
3. **Pendukung kontrak sosial**: sikap perusahaan dan organisasi lain terhadap masyarakat sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Memahami Filosofi Lingkungan dan Tragedi Kepemilikan Bersama"

Kode MK : GBE
MK : IMAA 193051

Kajian demografi terdapat 3 hal penting yang berkaitan dengan penduduk yaitu;

Dinamika penduduk,

Komposisi atau struktur penduduk,

Jumlah dan distribusi atau persebaran penduduk

Kode MK : GBE

- **Variabel Demografi : karakteristik penduduk (jumlah, persebaran, komposisi penduduk) dan Proses demografi (Fertilitas, mortalitas, migrasi)**
- **Variabel Non demografi : Keterkaitan dengan disiplin lain → sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, biologi**

Kode MK : GBE

Permasalahan Demografi

1. Fertilitas/Kelahiran : Menambah jumlah penduduk, ketidakseimbangan populasi suatu daerah, kemiskinan, dll	2. Mortalitas/Kematian : Mengurangi jumlah penduduk, ketidakseimbangan populasi suatu daerah, produktifitas menurun, dll
3. Mobilitas/Pergerakan penduduk : ketidakseimbangan populasi suatu daerah, kemiskinan, pengangguran, dll	4. Pernikahan : kemiskinan, penambahan jumlah penduduk, dll
	5. Perceraian : kemiskinan, kriminalitas, dll

Kode MK : GBE

Mason (2001), Ross(2004) dalam Adioetomo 2005

Bonus Demografi

proses penurunan fertilitas jangka panjang. Transisi demografi tersebut menurunkan proporsi penduduk umur muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja, dan ini menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.

Kode MK : GBE

Perubahan struktur umur penduduk akibat transisi demografi berdampak pada:

- 1). Peningkatan jumlah tenaga kerja yang apabila mendapatkan kesempatan kerja produktif akan meningkatkan total output,
- 2). Peningkatan tabungan,
- 3). Tersedianya human capital yang jumlahnya lebih banyak.

Kode MK : GBE

Teori Penduduk

Aliran :

- Pesimis : memandang jumlah penduduk yang besar akan merugikan pembangunan
- Optimis : memandang jumlah penduduk yang besar akan menguntungkan pembangunan
- Netral : tidak kaitan antara penduduk dan pembangunan

2024

Pesimis Dasar ; Teori Malthus

- Penduduk jika tidak dikontrol akan berkembang mengikuti deret ukur dan bahan makan akan berkembang mengikuti deret hitung
- Efeknya adalah munculnya kemiskinan

2024

Penduduk dan Perencanaan Pembangunan

- Penduduk berfungsi sebagai aspek supply, sebagai contoh dalam hal perencanaan sektor ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya
- Hal itu dapat dilakukan dengan cara menderivasi penduduk menurut kepentingan. Contoh: untuk sektor pendidikan diperlukan penduduk menurut umur sekolah SD, SMP dan SMU.

2024

23

Dalam rangka memperoleh sisi supply, maka peran proyeksi penduduk menjadi sangat esensial.

Untuk melakukan proyeksi penduduk yang "baik" perlu ditunjang oleh kualitas data kependudukan yang baik.

Data yang baik sangat tergantung kepada sumber data yang tersedia.

Sumber data apa yang perlu dikembangkan agar keperluan perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara baik ?

2024

24

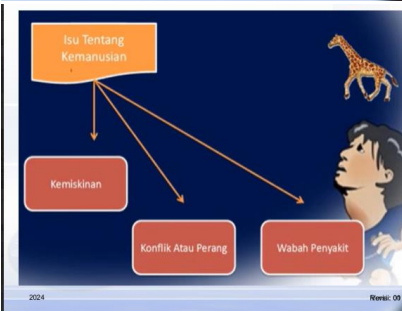
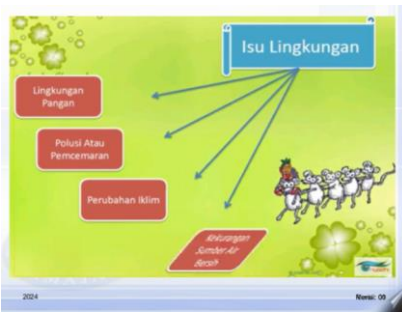
- Materi Pertemuan 6

GBE

Lingkungan Sosial dan Budaya

PERTEMUAN KE 6
Dr. Ita Fionita, S.E.,M.M

Kode BK : GBE
BK : IMA 19/0031



Masalah lingkungan global yang menjadi kendala besar di dunia adalah masalah kekurangan pangan, kekurangan sumber air bersih, munculnya polusi dan pencemaran lingkungan akibat sektor industri dan aktivitas manusia lainnya, serta masalah perubahan iklim yang tidak menentu akibat *global warming*.

Masalah kependudukan yang menjadi kendala dunia adalah kemiskinan, munculnya konflik bahkan perang, dan penyebaran wabah penyakit.

Pengertian perubahan sosial dan budaya adalah hal yang bisa dilihat dan rasakan di kehidupan sehari-hari kita.

Pada zaman dahulu, anak-anak seusia kalian belum mengenal dan belum mahir menggunakan teknologi komunikasi dan internet, sedangkan pada zaman sekarang, kalian bisa menggunakan teknologi komunikasi dan internet dengan sangat mahir. Jadi, hal tersebut merupakan wujud dari perubahan sosial yang membawa kemajuan.

Perubahan Sosial Budaya

perubahan sosial. Yaitu Perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompoknya

Perubahan budaya yaitu Perubahan dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat bersangkutan

- FAKTOR PENDORONG PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA**
- Kontak dengan Budaya Lain
 - Sikap Menghargai Hasil Karya Orang Lain
 - Sistem Pendidikan yang Maju
 - Keinginan untuk Maju
 - Toleransi terhadap Perubahan
 - Penduduk yang Heterogen
 - Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Bidang Kehidupan Tertentu
 - Sikap Mudah Menerima Hal-Hal Baru

CONTOH-CONTOH PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA YANG TERJADI DI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI NEGERI INI

1. Cara berkomunikasi
2. Cara berpakaian
3. Gaya hidup
4. Westernisasi
5. Emansipasi wanita

2014 Rensi: 09

CONTOH-CONTOH PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA YANG TERJADI DI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI NEGERI INI

6. Masyarakat semakin kritis
7. Hilangnya permainan tradisional
8. Pudarnya minat-minat kepada alat-alat music tradisional
9. Tergerusnya kebudayaan Indonesia
10. Penggunaan bahasa daerah semakin jarang

2024 Rensi: 09

• Materi Pertemuan 8



Lingkungan Politik dan Hukum

Kebijakan dan regulasi dalam operasional bisnis

Kebijakan dan regulasi memainkan peran kritis dalam operasional bisnis, membentuk kerangka kerja untuk aktivitas perusahaan dan memastikan ketahanan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang kebijakan dan regulasi dalam operasional bisnis.

1. Definisi Kebijakan dan Regulasi:

- Kebijakan:** Kumpulan pedoman dan prinsip yang membimbing pengambilan keputusan dan tindakan perusahaan. Kebijakan dapat mencakup aspek seperti etika bisnis, keamanan kerja, atau kebijakan sumber daya manusia.
- Regulasi:** Aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengendalikan perilaku di sektor bisnis. Regulasi dapat melibatkan aspek hukum, fiskal, lingkungan, atau industri tertentu.

2. Fungsi Kebijakan dan Regulasi:

- Pemandu Tindakan:** Kebijakan membantu memandu tindakan dan pengambilan keputusan di semua tingkatan perusahaan, memberikan kerangka kerja untuk beroperasi dengan konsistensi.
- Ketertarikan Hukum:** Regulasi menetapkan standar hukum yang harus diikuti perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.



Lingkungan Politik dan Hukum

4. Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan

- Penting bagi bisnis untuk memahami dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku di wilayah operasional mereka. Ini melibatkan pemenuhan persyaratan perizinan, pelaporan lingkungan, dan standar keamanan.

Keselamatan Kerja

1. Pembentukan Kebijakan Keselamatan Kerja

- Bisnis perlu mengembangkan kebijakan keselamatan kerja yang jelas dan dapat dipahami oleh semua karyawan. Kebijakan ini mencakup prosedur darurat, protokol keselamatan, dan tanggung jawab individu.

2. Pelatihan Keselamatan

- Menyediakan pelatihan reguler tentang keselamatan kerja untuk semua karyawan. Ini mencakup penggunaan peralatan pelindung diri, penanganan bahan berbahaya, dan prosedur keselamatan khusus berdasarkan jenis pekerjaan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Risiko

- Melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Ini membantu dalam mengprioritaskan tindakan pencegahan dan mengurangi risiko kecelakaan.

Lingkungan Politik dan Hukum

4. Keberlanjutan Jangka Panjang

- Praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan kerja mendukung keberlanjutan jangka panjang, mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan operasional.

Contoh Implementasi dalam Bisnis:

1. Penggunaan Energi Hijau

- Bisnis yang beralih ke sumber daya energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi.

2. Pemisahan Limbah dan Daur Ulang

- Menerapkan sistem pemisahan limbah dan daur ulang di tempat kerja untuk mengurangi limbah dan mendukung praktik ramah lingkungan.

3. Pelatihan Evakuasi dan Keselamatan

- Menyediakan pelatihan reguler tentang tindakan evakuasi darurat dan penggunaan peralatan keselamatan di tempat kerja.

Lingkungan Politik dan Hukum

Lingkungan Politik dan Hukum dalam Konteks Lingkungan Bisnis: Definisi, Ciri, Contoh, Manfaat, dan Referensi

Definisi

Lingkungan Politik dan Hukum dalam Bisnis: Lingkungan politik dan hukum dalam konteks bisnis merujuk pada faktor-faktor politik dan hukum yang dapat mempengaruhi operasi, kebijakan, dan keberlanjutan bisnis. Ini mencakup regulasi pemerintah, kebijakan fiskal, stabilitas politik, dan pengaruh politik pada pengembangan infrastruktur bisnis.

Ciri-Ciri Lingkungan Politik dan Hukum dalam Bisnis:

- Regulasi Bisnis:**
 - Adanya peraturan pemerintah yang mengatur praktik bisnis, seperti perizinan, persyaratan lingkungan, dan standar keamanan.
- Stabilitas Politik:**
 - Keadaan politik yang stabil dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat diprediksi.
- Pengaruh Kebijakan Fiskal:**
 - Kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi biaya dan keuntungan bisnis.
- Adaptasi dan Pengaruh Politik:**
 - Keterlibatan bisnis dalam kegiatan sosial/politik dan dampaknya terhadap citra perusahaan.



Lingkungan Politik dan Hukum

Perlindungan Lingkungan dan Keselamatan Kerja dalam Konteks Lingkungan Bisnis:

Perlindungan Lingkungan:

1. Pengelolaan Limbah

- Bisnis harus mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, termasuk daur ulang dan pemrosesan limbah secara aman. Hal ini membantu mencegah pencemaran lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

2. Konservasi Sumber Daya

- Mengimplementasikan kebijakan untuk konservasi sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku. Strategi ini dapat meningkatkan efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan teknologi hijau.

3. Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca

- Bisnis yang peduli terhadap lingkungan harus memantau dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini melibatkan penerapan teknologi bersih dan kebijakan pengurangan karbon.

Lingkungan Politik dan Hukum

4. Penerapan Teknologi Keselamatan

- Menerapkan teknologi keselamatan seperti sensor keamanan, sistem pemantauan, dan peralatan otomatisasi untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi karyawan.

Manfaat Perlindungan Lingkungan dan Keselamatan Kerja dalam Bisnis:

1. Citra Perusahaan yang Positif

- Keterlibatan aktif dalam perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan.

2. Kepatuhan Hukum

- Menerapkan praktik lingkungan dan keselamatan kerja yang baik memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan undang-undang yang berlaku.

3. Produktivitas yang Tinggi

- Karyawan yang merasa aman dan bekerja di lingkungan yang sehat cenderung lebih produktif. Ini juga dapat mengurangi tingkat absensi dan kecelakaan kerja.

Lingkungan Politik dan Hukum

Fitan.

Definisi:

Fitan adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atas penemuan yang baru, berguna, dan dapat dipatenkan.

Peran dalam Lingkungan Bisnis:

1. Stimulasi Inovasi

- Mendorong perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan baru dengan menjamin hak eksklusif atas penemuan mereka.

2. Keunggulan Bersaing

- Memberikan keunggulan bersaing kepada perusahaan dengan melindungi produk atau proses yang inovatif.

3. Investasi dan Pengembangan

- Menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, karena mereka dapat memungutkan hak paten atas hasil penemuan mereka.



Dampak pada Lingkungan Bisnis:

1. **Inovasi Berkelanjutan**
 - * Hak cipta dan paten mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi, mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis.
2. **Investasi dan Pengembangan**
 - * Perusahaan cenderung lebih berinvestasi dalam riset dan pengembangan ketika mereka tahu bahwa hasilnya dapat dilindungi oleh hak cipta atau paten.
3. **Perlindungan dari Persewaan Tidak Sehat**
 - * Hak cipta dan paten membantu melindungi perusahaan dari persaingan tidak sehat atau penggunaan ilegal inovasi mereka oleh pesaing.
4. **Mendorong Keberlanjutan Ekonomi**
 - * Mendorong keberlanjutan ekonomi dengan memberikan insentif bagi perusahaan untuk terus menghasilkan produk dan layanan inovatif.



Tantangan dan Pertimbangan Etis:

1. **Monopoli dan Akses Kesehatan**
 - * Perlu mempertimbangkan bagaimana hak cipta dan paten dapat menciptakan monopoli, yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap inovasi yang mungkin penting untuk kesehatan dan kesejahteraan.
2. **Pembaruan Hukum**
 - * Kepentingan untuk pembaruan hukum yang seimbang untuk memastikan perlindungan yang wajar bagi pemegang hak, sambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Keimpulan

Hak cipta dan paten memiliki peran krusial dalam mendorong inovasi, investasi, dan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis. Namun, perlindungan ini juga perlu diimbangi dengan pertimbangan etis dan keadilan, terutama dalam konteks akses terhadap inovasi yang dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

• Materi Pertemuan 10

GBE

Lingkungan Alami/Natural-10-

PERTEMUAN KE 10

Dr. Ita Fionita, S.E.,M.M

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

Lingkungan Alami

Pengertian

- Lingkungan pada umumnya dibagi menjadi faktor-faktor yang bersifat fisik dan biologis.
- Faktor fisik merupakan faktor lingkungan yang bersifat non biologis atau biotik, yaitu organisme yang berpengaruh terhadap organisme lain.
- Tumbuhan dan juga hewan dalam ekosistem merupakan bagian komponen biotik, komponen ini akan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tertentu.
- Dalam hal ini tidak ada organisme hidup yang mampu untuk berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada, dan harus ada kondisi lingkungan tertentu yang berperan terhadapnya dan menentukan kondisi hidupnya.

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

Lingkungan Alami

- Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik (tanah, air, udara, cuaca, suhu) dan faktor biotik (tumbuhan dan hewan, termasuk manusia)
- Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia.
- Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung.
- Daya dukung lingkungannya adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

Lingkungan Alam

- Lingkungan Alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Contoh lingkungan alam yang ada di permukaan bumi adalah sungai, danau, laut, gunung dan lembah.
- Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada mampu untuk menyeimbangkan keadaannya.
- Namun tidak tertutup kemungkinan, kondisi demikian dapat berubah oleh campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui Batas.

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

KOMPONEN FAKTOR LINGKUNGAN

- Faktor iklim yang meliputi parameter iklim utama seperti cahaya, temperatur, ketersediaan air, dan angin.
- Pengetahuan mengenai iklim menjadi sangat penting untuk pengelolaan lingkungan.
- Pengetahuan yang akurat tentang faktor-faktor iklim juga sangat diperlukan untuk mencapai sumberdaya pertanian secara maksimum.
- Salah satu ciri utama iklim daerah tropika adalah panas yang terus menerus.
- Suhunya tinggi dan variasi harian dalam waktu 24 jam lebih besar dibandingkan variasi lainnya dalam satu waktu keawaktu lainnya dalam satu tahun.

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

HUBUNGAN ANTARA FAKTOR LINGKUNGAN

- Faktor-faktor lingkungan saling berinteraksi antara satu sama lainnya, sehingga sangat sulit untuk memisahkan hanya dari satu faktor lingkungan.
- Sebagai contoh bahwa kedua faktor iklim dan topografi akan mempengaruhi perkembangan suatu tanah.
- Dengan demikian juga iklim dan tanah akan berpengaruh secara kuat dalam pola kontrolnya terhadap komponen biotik, menentukan jenis-jenis yang akan mampu menempati suatu tempat atau suatu daerah tertentu.
- Semua faktor lingkungan bervariasi secara ruang dan waktu.
- Organisme hidup bereaksi terhadap variasi lingkungan, sehingga hubungan yang nyata antara lingkungan dan organisme hidup ini akan membentuk komunitas dan ekosistem tertentu, baik berdasarkan ruang maupun waktu.

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

HUKUM MINIMUM DAN HUKUM TOLERANSI

- Hukum Toleransi dari Shelford menyatakan kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung kepada langkahnya kompleks-kompleks keadaan. Ketidadaan atau kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif dan kuantitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut
- Hukum Minimum Liebig Untuk dapat bertahan dan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan keperluan-keperluan dasar ini bervariasi antara jenis dan dengan keadaan

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

KONSEP FAKTOR-FAKTOR PEMBATAS

- Eksistensi dari keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung pada keadaan lingkungan yang sangat rumit.
- Suatu keadaan yang melampaui batas-batas toleransi disebut keadaan yang membatasi atau faktor pembatas.
- Faktor pembatas dapat mencapai nilai ekstrim maksimum maupun minimum dengan ukuran kritis.
- Faktor pembatas bervariasi dan berbeda untuk setiap tumbuhan maupun hewan dengan nilai ekstrim tertentu, sehingga terjadilah pengelompokan dan perkembangan serta penyebaran organisme tersebut.
- Suatu organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang konstan, maka faktor itu tidak merupakan pembatas.

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024

2024

Kulia MK - GBE
MK. SMA 100001

2024



- Sebaliknya bila mempunyai toleransi tertentu terhadap suatu faktor yang bervariasi dalam lingkungan, dapat menjadi faktor yang membatasi. Sebagai contoh oksigen yang tersedia cukup banyak dan tetap serta siap untuk digunakan dalam lingkungan daratan sehingga jarang membatasi organisme daratan.
- Pada pihak lain, oksigen jarang dan sangat bervariasi dalam air sehingga merupakan faktor pembatas pada organisme perairan. Keadaan lingkungan yang ekstrim mengurangi batas toleransi.
- Suatu contoh konsep faktor pembatas dengan membandingkan telur-telur ikan trout dan telur-telur kodok. Telur-telur ikan trout berkembang antara 0°C dan 12°C dengan optimum 4°C sedangkan telur-telur kodok antara 0°C dan 30°C dengan optimum 22°C. Jadi telur-telur ikan trout adalah stenothermal dan telur-telur kodok eurythermal.



Lingkungan Alami

Pembangunan ekonomi dan polusi

Polusi adalah masuknya kontaminan ke dalam lingkungan alami yang menyebabkan ketidakstabilan, gangguan, bahaya atau ketidaknyamanan pada ekosistem yaitu sistem fisik atau organisme hidup.”

- Ada beberapa unsur penyebab pencemaran. (Jay Raval)

• Materi Pertemuan 11

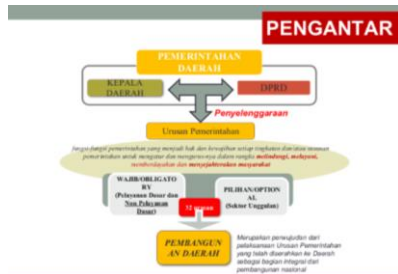
GBE

Lingkungan Pemerintah -11-

PERTEMUAN KE 11

Dr. Ita Fionita, S.E.,M.M

Kota MK - GBE
MK, SMA 1903031



KONSEP USULAN PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PENDAHULUAN

- Hasil monitoring dan kaji ulang pelaksanaan urusan kabupaten/kota dan perubahan selanjutnya.
- Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan kewenangan urusan kabupaten/kota dan perubahan.

URUSAN PEMERINTAH PUSAT

Pemerintah urusan pemerintah pusat yang telah berlangsung, atau UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan dan peraturan lain yang berkaitan dengan urusan di tingkat pemerintahan pusat. Usulan perubahan kewenangan di tingkat kabupaten/kota dan perubahan pemerintah pusat.

URUSAN PEMERINTAH PROVINSI

Pemerintah urusan pemerintah yang telah berlangsung, atau Ordes dan Peraturan Daerah dan peraturan lain yang berkaitan dengan urusan di tingkat pemerintahan provinsi. Usulan perubahan kewenangan di tingkat kabupaten/kota dan perubahan pemerintah provinsi.

URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah urusan pemerintah yang telah berlangsung, atau Ordes dan Peraturan Daerah dan peraturan lain yang berkaitan dengan urusan di tingkat pemerintahan kabupaten/kota. Usulan perubahan kewenangan di tingkat kabupaten/kota dan perubahan pemerintah kabupaten/kota.

KISI-KISI PENGISIAN KOLOM KEWENANGAN

"Setiap Usuran Pemerintahan Kabupaten (UPK) di dalam setiap Bidang dan Sub Bidang Usuran harus dijabarkan PetaKawannya pada kolom 4 (kewenangan daerah provinsi) dan kolom 6 (kewenangan daerah Kabupaten/Kota)"

- Memuat ruang lingkup atau komponen kewenangan pada setiap UPK yang diuraikan
- Bukan nama program atau kegiatan dan bukan unsur dan fungsi manajemen
- Tidak menyebutkan secara spesifik agar tidak mengikat terhadap perubahan
- Tidak bermaksud "birokrasi" Gubernur (provinsi) terhadap Bupati/Walikota (Kabupaten/kota)
- Ruang lingkup atau komponen kewenangan daerah provinsi harus berbidai dari yang daerah kabupaten/kota
- Terkait peraturan perlu memperincikan PP 24/2016 tentang Online Single Submission (OSS)

cover bal | Kata perni | ESP432 | MODUL | mail.google.com/mail/u/0/inbox/FMfcgZQpdqncfKkCmrtzcvfGrM?pro

cover bal | Kata perni | ESP432 | MODUL | mail.google.com/mail/u/0/inbox/FMfcgZQpdqncfKkCmrtzcvfGrM?pro

Isu - isu Lingkungan dan Kemiskinan

Urbanisasi
Kesalahan Pengatur Ruang
Koordinasi K hukum dan Good G yang berkepanjangan

Perkembangan Kebijakan Pengelola Page 10

Perkembangan Kebijakan Pengelola

1967 - 1972
Berdiri Lembaga Ekologi Urpad
Pembentukan Panitia Nasional PLH
Dibentuk Kementerian Negara PPLH

1978 - 1982
UU No 4 th. 1982 dasar hukum Tertu Terbitnya PP tentang AMDAL (1986 Dibentuk Tim Teta ruang (BCTR) Dibentuknya SAPEDAI untuk pangan Baku Muru - Baku Muru Lingkungan (KTT Rio 1992, Agenda 21 Diluncurkan Program - Program Biru dan Adipura) Revisi UU No. 4/1982 - UU No 23/

2000 - Sekarang
Desentralisasi, ISSD 2003

2014

Kebijakan Nasional

Pelestarian Lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan

Fungsi Lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pemomafactan SDA tak terpikirkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi, pemomafactan SDA terpikirkan perlu mempertahankan daya pemulihannya. Setip wanga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihn. Kualitas Lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencegahan dan perbaikan lingkungan perlu dihindari. Pelestarian Lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban.

Kota MK - GBE
MK, SMA 1903031

Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengorbankan potensi pembangunan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang oleh karena itu fungsi lingkungan perlu dilestarikan.

Misi Mendorong dilgukannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsekuen, konsisten dan berkesinambungan melalui penyusunan kebijakan, koordinasi, pelaksanaannya, pengawasan serta ikut dalam upaya di tingkat global bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan bumi ini melalui usaha-usaha yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kota MK - GBE
MK, SMA 1903031

Fokus Utama Kementerian Lingkungan Hidup



Membuat Kebijakan dan Peraturan - Peraturan Pelestarian dibidang LH, Pengawasan Non bank Fund, National ENV.

Management Good Env.

Governance: Parliament watch, Pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, kaderisasi dan komunikasi Proper, Superkasih, Penegakan hukum satu Atap, AMDAL dan Perizinan Pengendalian emisi mobil, unleaded gasoline, BBG dan PETII legal tagging, kebakaran hutan, Protokol (konvensi), pelestarian pantai dan iklim Peningkatan kemampuan laboratorium lingkungan, Sistem Informasi dan State of Environmental report (SUER), Peningkatan Pelaksanaan Diklat dibidang lingkungan dan melaksanakan serta mengembangkan Cleaner Production dan ISO an(Series)

Kode MK : GBE

Revisi : 00

Program Yang Dilaksanakan



- Deputi I Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi Pembangunan berkelanjutan (Pengembangan Kebijakan dan Sistem Pemantau serta Pemanuaan Kebijakan)
- Deputi II Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Tata Praja Lingkungan (Banyun Praja)
- Deputi III Pemberdayaan Masyarakat (warga Madan) dan Kerjasama dengan Badan Legislatif daerah dalam Pembangunan berkelanjutan
- Deputi IV Prager, Superkasih, AMDAL, Perizinan dan Penegakan hukum satu Atap
- Deputi V Pemasaran dari Sumber Non Institusi (geotelasan sampah, bensin tanpa timbal, PETI, Dampak Usaha Kecil)
- Deputi VI Pelestarian Lingkungan dalam rangka Pembangunan berkelanjutan Nasional, Regional dan global(pantai Lestari dll)
- Deputi VII Pengembangan Sistem Komunikasi (SOER), Pengembangan Diklat Lingkungan, Cleaner Production dan Laboratorium Lingkungan

Kode MK : GBE
MK, MMA 193031

Revisi : 00

• Materi Presentasi Mahasiswa Semester Genap 2024/2025

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN TEKNOLOGI TERHADAP LINGKUNGAN BISNIS: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA MODERN (STUDI EMPIRIS QRIS DAN E-COMMERCE)

Academy: 242220020
Kampus: 242220001
Materi: Prinsip-prinsip Manajemen: 2422 20000

• Peluang yang Diciptakan Teknologi

1. Peningkatan Efisiensi Operasional: Teknologi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas repetitif, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses bisnis.
2. Inovasi Model Bisnis: Teknologi membuka jalan bagi penciptaan model bisnis yang sama sekali baru.
3. Perluasan Jangkauan Pasar Global: Internet dan teknologi komunikasi telah mengatasi batasan geografis. Perusahaan, bahkan UMKM, kini dapat menjual produk atau layanannya ke konsumen di seluruh dunia tanpa harus memiliki kehadiran fisik di setiap negara.
4. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Dengan adanya Big Data dan Artificial Intelligence (AI), perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis volume data yang sangat besar.

Academy 1

• Studi Empiris: Dampak QRIS terhadap Lingkungan Bisnis

<p>QRIS (Quick Response Code Indonesia) adalah salah satu inovasi teknologi pembayaran digital yang telah mengubah lanskap transaksi di Indonesia. Manfaatnya bagi UMKM:</p>	<p>Peluang yang Diciptakan QRIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi Transaksi bagi UMKM 1. Kemudahan bagi Konsumen 2. Meningkatkan Transparansi dan Data Keuangan 	<p>Tantangan dalam Adopsi QRIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi Digital dan Literasi Keuangan 2. Infrastruktur dan Konektivitas 3. Keamanan Transaksi 4. Biaya Transaksi 5. Merchant Discount Rate (MDR)
---	--	---

Academy 1

• Implikasi Manajerial

1. **Kepercayaan Digital:** Manajer harus menjadi agen perubahan yang memahami potensi teknologi dan mampu memimpin transformasi digital dalam organisasi.
2. **Pengambilan Keputusan Berbasis Data:** Kemampuan untuk menginterpretasi data dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan strategis menjadi sangat penting. Manajer perlu mengembangkan literasi data dan analitis.
3. **Manajemen Risiko Teknologi:** Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi, seperti keamanan siber, privasi data, dan disrupti, adalah tanggung jawab kunci.
4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan digital karyawan menjadi esensial untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan memastikan tenaga kerja tetap relevan.

Academy 1

• Kesimpulan

Teknologi telah menjadi kekuatan transformatif yang tak terhindarkan dalam lingkungan bisnis modern, menghadirkan spektrum luas peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Dari efisiensi operasional yang ditingkatkan hingga inovasi model bisnis dan jangkauan pasar global, teknologi membuka jalan bagi pertumbuhan dan daya saing yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, di sisi lain, perusahaan juga harus menghadapi ancaman keamanan siber, kesenjangan keterampilan, biaya investasi yang signifikan, dan potensi disrupti terhadap praktik bisnis tradisional. Studi empiris QRIS dan e-commerce di Indonesia secara jelas menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendorong inklusi keuangan dan memperluas pasar, sekaligus menuntut literasi digital, infrastruktur yang memadai, dan strategi logistik yang tangguh.

Academy 1

Lingkungan Teknologi

Secara garis besar, teknologi telah memfasilitasi transformasi digital di hampir semua sektor industri. Ini bukan hanya tentang menggunakan komputer atau internet, tetapi tentang bagaimana teknologi mengubah model bisnis inti, proses operasional, dan pengalaman pelanggan. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi cenderung lebih unggul dan resilien (Porter & Heppelmann, 2014).

• Tantangan yang Muncul dari Teknologi

1. **Keamanan Siber dan Privasi Data:** Seiring dengan peningkatan konektivitas, risiko serangan siber dan kebocoran data juga meningkat. Perusahaan harus berinvestasi besar dalam sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif pelanggan dan data operasional mereka dari ancaman peretasan.
2. **Kesenjangan Keterampilan (Skill Gap):** Adopsi teknologi baru seringkali membutuhkan keterampilan yang berbeda dari tenaga kerja yang ada.
3. **Biaya Investasi dan Adaptasi:** Implementasi teknologi canggih seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan, baik untuk hardware, software, maupun infrastruktur.
4. **Disrupsi Bisnis Tradisional:** Teknologi dapat mendisrupsi model bisnis yang sudah mapan. Perusahaan yang lambat berinovasi atau menolak perubahan teknologi berisiko kehilangan pangsa pasar secara drastis kepada pesaing yang lebih adaptif.

Academy 1

• Studi Empiris: Dampak E-commerce terhadap Lingkungan Bisnis

E-commerce merujuk pada aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTokshop, dan lainnya telah menciptakan pasar virtual raksasa di mana jutaan produk diperjualbelikan setiap hari. Ini bukan hanya tentang toko online, tetapi juga tentang ekosistem yang melibatkan logistik, pembayaran, pemasaran digital, dan layanan pelanggan (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019).

<p>1. Peluang yang Diciptakan E-commerce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan Pasar yang Luas 2. Biaya Operasional yang Lebih Rendah 3. Akses ke Data Konsumen yang Kaya 4. Fleksibilitas dan Skalabilitas 5. Peluang Inovasi Pemasaran 	<p>2. Tantangan dalam E-commerce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan yang Sangat Ketat 2. Manajemen Logistik dan Pengiriman 3. Membangun Kepercayaan Konsumen 4. Keamanan Transaksi Online 5. Ketergantungan pada Platform
---	--

Academy 1

• Strategi Adaptasi

1. **Inovasi Berkelanjutan:** Perusahaan harus terus-menerus mencari cara baru untuk memanfaatkan teknologi, baik untuk meningkatkan produk/layanan yang ada maupun untuk menciptakan penawaran baru. Ini bisa berarti berinvestasi dalam R&D atau berkolaborasi dengan startup teknologi.
2. **Fokus pada Pengalaman Pelanggan:** Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara holistik, dari personalisasi hingga layanan purna jual.
3. **Membangun Ekosistem Digital:** Bisnis tidak bisa berdiri sendiri. Membangun kemitraan strategis dengan penyedia teknologi, platform pembayaran, atau penyedia logistik dapat menciptakan sinergi dan memperkuat posisi bisnis dalam ekosistem digital.
4. **Tata Kelola Data yang Kukuh:** Menerapkan kebijakan dan praktik terbaik untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan perlindungan data pelanggan. Ini tidak hanya untuk kepatuhan regulasi tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen.
5. **Agitasi Organisasi:** Mengembangkan struktur organisasi yang fleksibel dan budaya yang mendorong adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan pasar. Ini termasuk adopsi metodologi agile dalam pengembangan produk dan proyek.

Academy 1

Terima kasih

Academy 1

DAMPAK LINGKUNGAN DEMOGRAFI TERHADAP LINGKUNGAN BISNIS

Kelompok 2
Idah Suryaningih (2422311027)
Kamalita Yulinda (2422311031)



KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN DEMOGRAFI

Program Keluarga Berencana (KB)

Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi kapasitas sumber daya yang tersedia.



Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia

peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi tujuan strategis untuk mempersiapkan penduduk agar mampu bersaing di era global.

Kebijakan Migrasi

Pemerintah mengatur arus migrasi penduduk, baik antar negara, maupun maupun antar region, melalui kebijakan yang mendukung distribusi penduduk yang lebih merata.

Kebijakan Program Pensiun dan Jaminan Sosial

Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan rasa aman, kesejahteraan, dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

DAMPAK LINGKUNGAN DEMOGRAFI TERHADAP LINGKUNGAN BISNIS



Perubahan dalam struktur usia populasi dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan.



Perubahan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas.



Pergeseran demografi juga dapat mempengaruhi pola konsumsi dan preferensi merek.



Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan internet, konsumen kini lebih cenderung melakukan riset sebelum membeli produk.

KESIMPULAN



Kesimpulan dari analisis lingkungan demografi di lingkungan bisnis menunjukkan bahwa faktor-faktor demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi dan keberlangsungan bisnis di Indonesia. Dengan memahami karakteristik demografi, kebijakan pemerintah, serta dampak lingkungan demografi, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjangkau konsumen.

LINGKUNGAN DEMOGRAFI

Lingkungan demografi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah. Lingkungan ini mencakup karakteristik penduduk seperti ukuran dan pertumbuhan populasi, distribusi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan komposisi rumah tangga. Selain itu, tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk juga menjadi bagian penting dari lingkungan demografi.



PERAN LINGKUNGAN DEMOGRAFI DALAM LINGKUNGAN BISNIS



Studi Kasus

Studi kasus yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dampak lingkungan demografi terhadap bisnis di Indonesia semakin signifikan. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan demografi dan memahami kebutuhan konsumen memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Misalnya, sebuah perusahaan ritel yang fokus pada produk ramah lingkungan berhasil meningkatkan penjualannya sebesar 30% dalam periode dua tahun, berkat meningkatnya kesadaran konsumen akan isu-isu lingkungan.

THANK YOU



• Materi Presentasi Mahasiswa Semester Ganjil 2024/2025

Keompok V

" LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA "

Memahami Interaksi Manusia dan Budaya

OLEH KELOMPOK V

1. Indah Pratihanti
2. Pipit Amartikus
3. Yudani
4. Henia
5. Dedy Amarah

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

APA ITU LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA:

Keseluruhan kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi kehidupan individu dan kelompok dalam Masyarakat.

UNSUR - UNSUR :

1. NORMA DAN NILAI
2. STRUKTUR SOSIAL
3. INSTITUSI SOSIAL
4. BUDAYA POPULER

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

UNSUR-UNSUR :

- 1. NORMA DAN NILAI**
Norma: Aturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi. Contoh norma sopan santun, etika, luhur.
Nilai: Keyakinan mendasar tentang apa yang baik, buruk, benar, atau salah. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari norma dan perilaku individu dalam masyarakat. Contoh nilai kejujuran, keadilan, gotong royong.
- 2. STRUKTUR SOSIAL**
 - Struktur Sosial
 - Hierarki Sosial
 - Peran Sosial
 - Status Sosial
- 3. INSTITUSI SOSIAL**
 - Institusi sosial: Organisasi yang terstruktur dalam masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mempertahankan keberlanjutan sosial. Contoh: keluarga, pendidikan, agama, pemerintahan, ekonomi.
 - Fungsi institusi sosial
 - Sosialisasi: Menjangkau nilai-nilai dan norma sosial kepada individu.
 - Kontrol sosial: Menjaga keberlanjutan dan stabilitas dalam masyarakat.
 - Produktif dan distribusi barang dan jasa.
 - Pemertahanan nilai-nilai budaya.
- 4. BUDAYA POPULER**
Budaya populer: Ide, gaya, atau produk budaya yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Contoh budaya populer: musik, film, televisi, mode, gaya hidup.

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

DAMPAK LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA:

DAMPAK POSITIF :

1. IDENTITAS DAN KEBANGGAAN
2. KOHESIVITAS SOSIAL
3. INOVASI DAN KREATIVITAS

DAMPAK NEGATIF :

1. DISKRIMINASI DAN KETIDAKSETARAAN
2. KONFLIK SOSIAL
3. PERUBAHAN BUDAYA YANG CEPAT

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

DAMPAK POSITIF :

- 1. IDENTITAS DAN KEBANGGAAN**
 - Penguatan identitas kelompok
 - Pelestarian budaya
 - Meningkatkan rasa percaya diri
- 2. KOHESIVITAS SOSIAL**
 - Peningkatan solidaritas
 - Peningkatan apoliditas
 - Stabilitas sosial
- 3. INOVASI DAN KREATIVITAS**
 - Pertukaran ide
 - Pembelajaran Bersama
 - Adaptasi terhadap perubahan

DAMPAK NEGATIF :

- 1. DISKRIMINASI DAN KETIDAKSETARAAN**
 - Pengucilan sosial
 - Kesenjangan sosial
 - Pelanggaran hak asasi manusia
- 2. KONFLIK SOSIAL**
 - Pelanggaran hak asasi manusia
 - Kekerasan
 - Perpecahan sosial
- 3. PERUBAHAN BUDAYA YANG CEPAT**
 - Hilangnya identitas
 - Disorientasi sosial
 - Konflik generasi

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

CONTOH LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

- ➔ CONTOH 1 MASYARAKAT PEDESAAN VS PERKOTAAN
- ➔ CONTOH 2 BUDAYA ORGANISASI
- ➔ CONTOH 3 GLOBALISASI DAN BUDAYA POP

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

CONTOH LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

- 1. MASYARAKAT PEDESAAN**
 - Struktur Sosial
 - Nilai Dan Norma
 - Pekerjaan
 - Interaksi Sosial
 - Agama
- 2. BUDAYA ORGANISASI**
 - Organisasi startup
 - Organisasi pemerintahan
 - Organisasi nirlaba
- 3. GLOBALISASI & BUDAYA**
 - Penyebaran budaya pop
 - Standarisasi budaya
 - Akulturasi budaya

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

KESIMPULAN

1. RINGKASAN
2. PENTINGNYA MEMAHAMI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA
3. AJAKAN UNTUK LEBIH MENGHARGAI KEBERAGAMAN

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

1. KESIMPULAN

Lingkungan sosial budaya sangatlah beragam dan kompleks. Faktor faktor seperti lokasi geografis, sejarah, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberagaman lingkungan sosial budaya yang unik. Memahami lingkungan sosial budaya sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan untuk berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat yang beragam.

2. PENTINGNYA MEMAHAMI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

- Membangun Hubungan yang Lebih Baik
- Mencegah Konflik
- Meningkatkan Efektivitas Komunikasi
- Fostering Inovasi
- Menghargai Keberagaman

3. AJAKAN UNTUK LEBIH MENGHARGAI KEBERAGAMAN

- Terbuka terhadap Perbedaan
- Menghormati Nilai dan Keyakinan Orang Lain
- Menemuka Orang Lain Apa Adanya
- Bekerja Sama untuk Mencapai Tujuan Bersama

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

Keompok V

Terima Kasih

PRODIAN FISCAL SAKSIWA
FACULTAS TEKNIK DAN BINA BANGUN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DARMAJAYA
SEKELoa LAMPUNG 2024

